



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

Jl. Diponegoro No.202, Mijen, Gedanganak, Kec. Ungaran Timur

No. Tlp: 0246921424 Kode pos : 50519

Website: <https://kabsemarangtourism.com>, e-mail: dispartakabsemarang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

LKjIP merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban tahunan Instansi Pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan dalam program kegiatan selama tahun 2025. LKjIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata

Kabupaten Semarang Tahun 2025 serta program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 sehingga dapat tersusun LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025 ini. Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat.

Ungaran, 20 Februari 2026
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	3
1.3. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	16
1.4. DASAR HUKUM.....	19
1.5. SISTEMATIKA.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS.....	24
2.1.1. RENSTRA 2021–2026.....	24
2.1.2. RENSTRA 2025-2029.....	25
2.1.3. Strategi Pembangunan	26
2.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025	32
2.2. PERJANJIAN KINERJA	36
2.2.1. Perjanjian Kinerja berdasarkan RENSTRA 2021–2026.....	36
2.2.2. Perjanjian Kinerja berdasarkan RENSTRA 2025-2029.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	38
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja	39
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	40
3.1.3. Inovasi	68
3.1.4. Penghargaan	72
3.2 REALISASI ANGGARAN	75

BAB IV PENUTUP	85
4.1 KESIMPULAN	85
4.2. SARAN	87
4.3. TINDAK LANJUT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024	89
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Strategi Pembangunan Dinas Pariwisata RENSTRA 2021-2026	28
Tabel 2.2	Target Kinerja Dinas Pariwisata RENSTRA 2021-2026	29
Tabel 2.3	Strategi Pembangunan Dinas Pariwisata RENSTRA 2025-2029	30
Tabel 2.4	Target Kinerja Dinas Pariwisata RENSTRA 2025-2029	31
Tabel 2.5	Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pariwisata RENSTRA 2021-2026	33
Tabel 2.6	Arah Kebijakan Dinas Pariwisata RENSTRA 2025-2029	34
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Tahun 2025 (2021-2026) ...	36
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Tahun 2025 (2025-2029) ...	37
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	40
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026	41
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	42
Tabel 3.4	Realisasi Presentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	43
Tabel 3.5	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Tahun 2023-2025	43
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target dalam RPJMD Berdasarkan RPJMD 2021-2026.....	44
Tabel 3.7	Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota	45
Tabel 3.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	51
Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	53
Tabel 3.11	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RENSTRA 2025-2029.....	56
Tabel 3.12	Perbandingan capaian kinerja utama antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	57
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Dalam RPJMD	58
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025.....	59

Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	60
Tabel 3.16 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	65
Tabel 3.17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program.....	66
Tabel 3.18 Penghargaan Pelaku Wisata Kabupaten Semarang	72
Tabel 3.19 Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025	76
Tabel 3.20 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata.....	82
Tabel 4.1 Komponen Penilaian Evaluasi AKIP	90
Tabel 4.2 Progres Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2024	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Website Dinas Pariwisata (kabsemarangtourism.id).....	68
Gambar 3.2	Podcast Youtube	69
Gambar 3.3	Instagram Dinas Pariwisata (@pesona_kabsemarang).....	69
Gambar 3.4	Acara Malam Puncak Festival Gedongsongo.....	70
Gambar 3.5	Acara Jamasan Candi pada Festival Gedongsongo.....	70
Gambar 3.6	Festival Rawa Pening	71
Gambar 3.7	Acara Lomba Tari pada Festival Rawa Pening.....	71
Gambar 3.8	Acara Festival Ekonomi Kreatif.....	71
Gambar 3.9	Lomba Apresiasi dan Konvensi Kelembagaan	73
Gambar 3.10	Lomba Atraksi Kesenian.....	73
Gambar 3.11	Piagam Penghargaan Lomba Apresiasi dan Konvensi.....	74
Gambar 3.12	Piagam Penghargaan Lomba Atraksi Kesenian	74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perubahan 2025
- Lampiran 2. Evaluasi Rencana Aksi
- Lampiran 3. Rencana Kerja Tahunan
- Lampiran 4. Berita Tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2024
- Lampiran 5. Rekap realisasi Kunjungan Wisata tahun 2018-2025
- Lampiran 6. Rekap realisasi kontribusi dan prosentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus digalakkan oleh Pemerintah. Hal ini karena pariwisata memiliki peran sangat penting dalam pembangunan khususnya sebagai salah satu penghasil pendapatan daerah dan sebagai mesin penggerak perekonomian. Pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran, karena sektor Pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 95 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Dinas Pariwisata merupakan perangkat daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Adapun rincian tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut;

- a. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Semarang;

- b. Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada prinsipnya merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan sampai dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Semarang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 2025–2029. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Pada Tahun 2025 hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB,
2. Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pelaksanaan penatausahaan Dinas Pariwisata; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun secara lengkap tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas pokok;

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata.

b. Fungsi;

- 1) perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 2) perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3) pelaksanaan penatausahaan Dinas Pariwisata;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Rincian tugas;

- 1) Merumuskan program kerja dan anggaran dinas pariwisata;
- 2) Merumuskan kebijakan di bidang pariwisata;
- 3) menetapkan kebijakan teknis di bidang Pariwisata;
- 4) menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
- 5) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;
- 6) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 7) menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pariwisata;
- 8) menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- 9) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
- 10) menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- 11) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Sekretariat,

a. Tugas pokok;

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

b. Fungsi;

- 1) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
- 3) Pelaksanaan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

c. Rincian tugas;

- 1) merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) merumuskan program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- 4) mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
- 5) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- 6) mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, perencanaan dan keuangan;
- 7) menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- 8) mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- 9) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- 10) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- 11) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bidang Industri Pariwisata,

a. Tugas pokok;

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang Industri Pariwisata,

b. Fungsi;

- 1) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Usaha Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata pada Bidang Industri Pariwisata;
- 2) penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di Bidang Industri Pariwisata, Standardisasi Usaha Pariwisata, dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan industri pariwisata.

c. Rincian tugas;

- 1) Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Industri Pariwisata;
- 2) merumuskan kebijakan teknis di bidang Industri Pariwisata;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Industri Pariwisata;
- 5) menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama di bidang Industri Pariwisata meliputi Usaha Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata;

- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri Pariwisata;
- 7) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Industri Pariwisata;
- 8) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Destinasi Pariwisata

a. Tugas pokok;

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang destinasi pariwisata.

b. Fungsi;

- 1) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Produk Wisata pada Bidang Destinasi Pariwisata;
- 2) penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata.

c. Rincian tugas;

- 1) menyusun program kerja dan anggaran Bidang Destinasi Pariwisata;
- 2) merumuskan kebijakan teknis di bidang Destinasi Pariwisata;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;
- 5) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA);
- 6) menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama di bidang Destinasi Pariwisata meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Produk Wisata;
- 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;
- 8) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;
- 9) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pemasaran Pariwisata

- a. Tugas pokok;

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang Pemasaran Pariwisata.

b. Fungsi;

- 1) perumusan program kebijakan Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Promosi dan Kemitraan di Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- 3) pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata.

c. Rincian tugas;

- 1) menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 2) merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 5) merencanakan pelaksanaan pengembangan pasar pariwisata daerah;
- 6) kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi di bidang pengembangan segmen pasar, promosi, informasi dan kemitraan;
- 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran;

- 8) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 9) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. UPTD Pariwisata

a. Tugas pokok;

Melaksanakan tugas Dinas Pariwisata dalam pengelolaan UPTD Pariwisata.

b. Fungsi;

c. Rincian tugas;

- 1) menyusun program kerja dan anggaran UPTD Pariwisata;
- 2) membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- 3) memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPTD Pariwisata;
- 4) melaksanakan pemungutan retribusi obyek wisata;
- 5) melaksanakan pelayanan dan informasi di obyek wisata;
- 6) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan barang daerah di lingkungan UPTD Pariwisata;

- 7) melaksanakan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait dan stakeholder dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan obyek wisata;
- 8) melaksanakan koordinasi dengan obyek wisata yang dikelola oleh pihak swasta;
- 9) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Pariwisata;
- 10) menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan di Obyek Wisata secara periodik;
- 11) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Pariwisata;
- 12) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

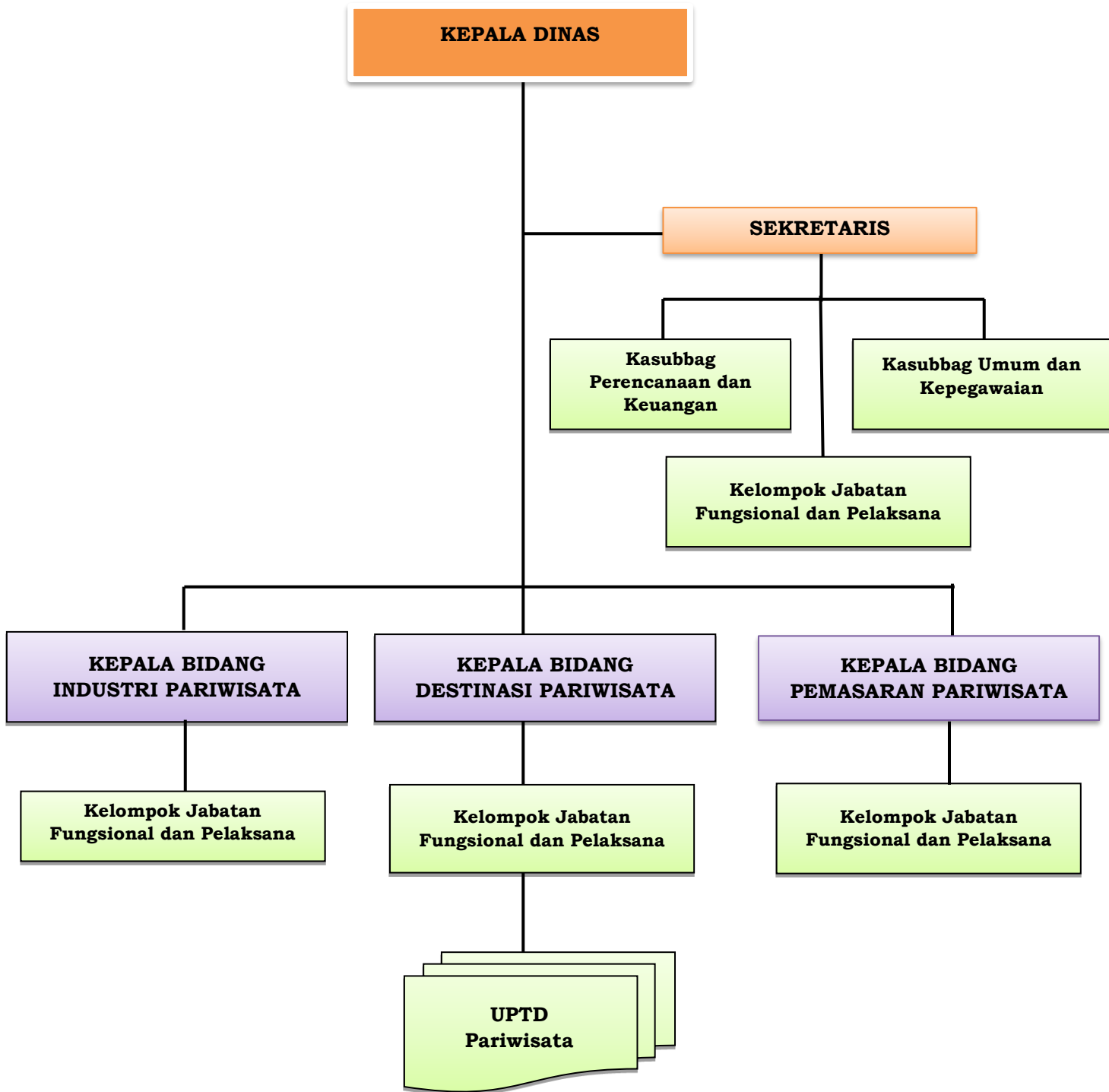
B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- 3. Bidang Industri Pariwisata
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- 4. Bidang Destinasi Pariwisata
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- 5. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- 6. UPTD Pariwisata.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

C. Kondisi Dinas Pariwisata

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang didukung oleh sumber daya manusia yang bervariasi baik dari segi pangkat dan golongan, jenis pendidikan, yang saling mendukung satu sama lain.

Jumlah sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang selama tahun 2025 sebanyak 89 orang terdiri dari 32 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 4 orang CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), 10 orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), 43 orang PPPK Paruh Waktu.

a. Berdasarkan jenjang kepangkatan PNS terinci sebagai berikut:

- 1) Golongan IV : 7 orang
- 2) Golongan III : 16 orang
- 3) Golongan II : 7 orang
- 4) Golongan I : 2 orang

b. Berdasarkan jenjang kepangkatan CPNS terinci sebagai berikut:

- 1) Golongan III : 4 orang

c. Berdasarkan jenjang kepangkatan PPPK terinci sebagai berikut:

- 1) Golongan IX : 9 orang
- 2) Golongan VIII : 1 orang

d. Berdasarkan jenjang pendidikan PNS terinci sebagai berikut:

- 1) Pasca Sarjana (S2) : 9 orang

- 2) Sarjana (S1) : 7 orang
- 3) Sarjana Muda : 1 orang
- 4) SLTA : 11 orang
- 5) SLTP : 2 orang
- 6) SD : 2 orang

e. Berdasarkan jenjang pendidikan CPNS terinci sebagai berikut:

- 1) Sarjana (S1) : 4 orang

f. Berdasarkan jenjang pendidikan PPPK terinci sebagai berikut:

- 1) Sarjana (S1) : 9 orang
- 2) Sarjana Muda : 1 orang

B. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

- a. Inventarisasi Tanah dan Bangunan Gedung
- b. Inventarisasi Kendaraan Operasional Dinas
- c. Inventaris Peralatan Kantor, Alat Rumah Tangga

1.3. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

A. Aspek Strategis

Aspek strategis Dinas Pariwisata adalah kondisi atau faktor penting yang harus diperhatikan karena berdampak signifikan pada arah masa depan Dinas Pariwisata. Ini mencakup visi, misi, nilai-nilai, dan peluang yang ingin diraih.

Aspek strategis Dinas Pariwisata disimpulkan dari 2 dokumen RENSTRA antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Strategis RENSTRA 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional.
- d. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.
- f. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
- g. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.

2. Aspek Strategis RENSTRA 2025-2029 adalah:

- a. Banyaknya kekayaan dan keragaman potensi pariwisata yang bisa dikembangkan;
- b. Meningkatnya event dan promosi pariwisata di dalam maupun di luar daerah;
- c. Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat.

B. Permasalahan Utama

Permasalahan utama Dinas Pariwisata adalah situasi tidak memuaskan saat ini yang menghambat kinerja dan memerlukan pemecahan segera agar tidak mengganggu pencapaian tujuan Dinas Pariwisata jangka panjang. Permasalahan utama Dinas Pariwisata disimpulkan dari 2 dokumen RENSTRA antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan utama RENSTRA 2021-2026 adalah:

- a. Masalah pokok: Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah/PDRB
- b. Masalah: Kunjungan wisatawan menurun dan lama kunjungan rendah
- c. Akar masalah:
 - 1) Daya tarik destinasi wisata masih rendah
 - 2) Promosi dan pemasaran pariwisata belum optimal
 - 3) Usaha dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif belum terstandarisasi

2. Permasalahan utama RENSTRA 2025-2029 adalah:

- a. Masalah pokok: Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata yang berpengaruh pada kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah/PDRB
- b. Masalah: Kunjungan wisatawan belum optimal dan lama tinggal wisatawan masih rendah, sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal
- c. Akar masalah:
 - 1) Daya tarik destinasi wisata masih rendah
 - 2) Promosi dan pemasaran pariwisata belum optimal
 - 3) Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum optimal

1.4. DASAR HUKUM

Pada bagian ini disampaikan dasar dasar hukum yang mendasari pentingnya penyampaian laporan kinerja perangkat daerah sebagai upaya pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah selama masa kerja tahun berkenaan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
2. Peraturan Presiden Nomor 209 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
7. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

12. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
14. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
15. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Struktur organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek strategi serta Permasalahan Utama
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika

Bab II :Perencanaan Kinerja

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - 2.1.1. RENSTRA 2021-2026 (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran)
 - 2.1.2. RENSTRA 2025-2029 (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran)
 - 2.1.3. Strategi Pembangunan
 - 2.1.4. Arah kebijakan Pembangunan Tahun 2025
- 2.2. Perjanjian Kinerja 2025
 - 2.2.1. Perjanjian Kinerja Berdasarkan RENSTRA 2021-2026
 - 2.2.2. Perjanjian Kinerja Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja
 - 3.1.2 Capaian Indikator Kinerja
 - 3.1.3 Inovasi
 - 3.1.4 penghargaan
- 3.2. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- 4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

4.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Penjabaran rencana strategis Dinas Pariwisata berpedoman pada 2 (dua) dokumen Renstra, karena tahun anggaran 2025 adalah tahun pergantian Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang:

2.1.1. RENSTRA 2021–2026

1. Visi:

“Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”.

2. Misi;

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang membidangi 1 (satu) urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melaksanakan misi ke-2 (dua) yaitu “Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.”

3. Tujuan;

“Mempercepat pemulihan ekonomi untuk menahan laju peningkatan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan kemandirian pangan”

4. Sasaran;

Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan

5. Program unggulan;

- a. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Penataan Kawasan Wisata Strategis, Desa Wisata dan Kampung Wisata yang terintegrasi.
- b. Kalender Event Pariwisata untuk promosi pariwisata

2.1.2. RENSTRA 2025-2029

1. Visi;

“Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

2. Misi;

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang membidangi 1 (satu) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melaksanakan misi ke-2 (dua) yaitu “Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan”

3. Tujuan;

Melalui urusan pilihan, Dinas Pariwisata melaksanakan tujuan daerah yang ke 4 (empat); “Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan”.

4. Sasaran

Melalui urusan pilihan, Dinas Pariwisata sasaran daerah yang ke 4 (empat); “Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah”.

5. Program dan kegiatan Kepala Daerah

- a. Program prioritas; Peningkatan kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif.
- b. Kegiatan prioritas;
 - 1) Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi.
 - 2) Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata.

2.1.3. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berfokus pada peningkatan sarana prasarana, penguatan promosi kreatif, pengembangan sumber daya manusia dibidang pariwisata, dan penguatan kemitraan untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Fokus pembangunan melalui pengelolaan dan pengembangan 5 (lima) Daya Tarik Wisata berkelanjutan (Candi Gedong Songo, Pemandian Muncul, Bukit Cinta, Palagan Ambarawa dan Waterpark Muncul) serta ruang terbuka public yaitu Alun-alun Bung Karno Kalirejo Ungaran dan Alun-alun Tambakboyo Ambarawa.

Strategi pembangunan dan target kinerja jangka menengah (5 tahun) dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten

Semarang sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan RENSTRA 2025-2029, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Strategi Pembangunan dan target Kinerja RENSTRA 2021-2026

Tabel 2.1 Strategi Pembangunan Dinas Pariwisata RENSTRA 2021-2026

VISI	BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI) Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika		
MISI 2	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan		
TUJUAN DAERAH	Mempercepat pemulihan ekonomi untuk menahan laju peningkatan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan kemandirian pangan		
SASARAN DAERAH	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	
Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	1	Meningkatkan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata pada obyek wisata, destinasi wisata dan kawasan wisata strategis
		2	Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan desa wisata
		3	Promosi dan pemasaran destinasi wisata melalui penguatan "branding" penyelenggaraan kalender event skala nasional-internasional dan berbasis teknologi digital
		4	Kerjasama/kemitraan lintas pelaku dan meningkatkan kapasitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai standar kompetensi
		5	Mengembangkan industri berbasis MICE, wisata alam dan budaya
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	1	Optimalisasi dan pengembangan sumber daya Perangkat Daerah
		2	Digitalisasi pelayanan dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah

Sumber : RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 2021-2026

Tabel 2.2 Target Kinerja Dinas Pariwisata RENSTRA 2021-2026

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PD	SATUAN	Kondisi Tahun 2020	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-						TARGET AKHIR KINERJA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	-16,8	5,4	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	56,9
		Pertumbuhan sektor pariwisata	%	-6,6	4,1 - 5,1	4,3 - 5,3	4,4 - 5,4	4,5 - 5,5	4,6 - 5,6	4,7 - 5,7	4,7 - 5,7
	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	(%)	-47	10	10	12	14,5	17	20	83,5
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah		Nilai LKJIP	(%)	60,82 (B)	62,60 (B)	65,10 (B)	67,70 (B)	70,40 (BB)	73,20 (BB)	75,30 (BB)	75,30 (BB)
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 2021-2026

2. Strategi Pembangunan dan target Kinerja RENSTRA 2025-2029

Tabel 2.3 Strategi Pembangunan Dinas Pariwisata RENSTRA 2025-2029

VISI	Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
FRASA VISI	Mandiri			
MISI 2	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan			
TUJUAN DAERAH	Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan			
SASARAN DAERAH	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD		
Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	1) Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	1	Meningkatkan 4A yaitu atraksi (daya tarik), amenitas (infrastruktur sarana prasarana), aksesibilitas dan ancillary (kelembagaan yang menyediakan layanan tambahan) pada Daya Tarik Wisata, destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata strategis termasuk pengembangan aglomerasi pariwisata kawasan Rawa Pening - Kopeng - Borobudur	
		2	Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan desa wisata serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola desa wisata (Pokdarwis)	
		3	Promosi dan pemasaran destinasi pariwisata melalui penguatan destination branding, penyelenggaraan kalender event skala nasional-internasional serta promosi berbasis teknologi digital	
		4	Meningkatkan service excellence atau pelayanan prima kepada para wisatawan melalui peningkatan kapasitas SDM pariwisata/ekonomi kreatif sesuai standar kompetensi	
		5	Mengembangkan industri pariwisata termasuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, berbasis ekonomi kreatif, MICE, wisata alam dan agrowisata, wisata budaya, serta sport tourism	
		6	Kerjasama/kemitraan/jejaring pariwisata dengan Pemerintah Pusat/Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata (Swasta), masyarakat dan komunitas lokal, media dan platform digital, serta lembaga swasta lainnya	
	2) Meningkatkan kepuasan masyarakat penerima layanan di Perangkat daerah	1	Optimalisasi dan pengembangan sumber daya Perangkat Daerah	
		2	Digitalisasi pelayanan dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	

Tabel 2.4 Target Kinerja Dinas Pariwisata RENSTRA 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,362	3,365	3,370	3,380	3,390	3,610
2		Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8
3		Meningkatnya kepuasan masyarakat penerima layanan di Perangkat Daerah	Nilai SKM	Nilai	85,10	85,20	85,35	85,50	85,70	85,90

Sumber: Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 2025-2029

2.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Semarang diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah, arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata. Untuk itu dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pariwisata Berdasarkan RENSTRA 2021-2026

Tabel 2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pariwisata RENSTRA 2021-2026

VISI	BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI) Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika		
MISI 2	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan		
TUJUAN DAERAH	Mempercepat pemulihan ekonomi untuk menahan laju peningkatan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan kemandirian pangan		
SASARAN DAERAH	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan		
Tujuan PD	Sasaran PD	Arah Kebijakan PD	
Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	1	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan sarana prasarana pendukung terutama pada kawasan strategis pariwisata, dan desa wisata
		2	Peningkatan pemasaran pariwisata melalui penguatan "branding", event skala nasional-internasional, digitalisasi dan kemitraan lintas pelaku
		3	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai standar kompetensi
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	1	Penyelenggaraan tertib manajemen kinerja Perangkat Daerah
		2	Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan Perangkat Daerah
		3	Penyelenggaraan tertib administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah
		4	Penyelenggaraan tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
		5	Penyelenggaraan tertib administrasi umum Perangkat Daerah

Sumber: Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 2021-2026

2. Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pariwisata Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

Tabel 2.6 Arah Kebijakan Dinas Pariwisata RENSTRA 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK		Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Renstra PD	
1	1	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;	Peningkatan sarpras obyek wisata	1	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan sarana prasarana pendukung terutama pada desa wisata dan kawasan strategis pariwisata, termasuk kawasan pendukung aglomerasi Rawa Pening – Kopeng – Borobudur
	2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;			
	3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;			
	4	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang;			
	5	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043			
2	1	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;	Pengembangan digitalisasi kelembagaan dan pemasaran pariwisata	1	Penguatan dan pembinaan kelembagaan pariwisata (Pokdarwis, dan lain-lain) serta peningkatan kapasitas SDM kelembagaan pariwisata
	2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;			
	3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;			
	4	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang;			
	5	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043			
				2	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pembinaan, pelatihan, uji kompetensi, serta sertifikasi pelaku dan usaha pariwisata/ekonomi kreatif
				3	Penguatan <i>destination branding</i> melalui kerjasama/kemitraan/jejaring pemasaran pariwisata, promosi pariwisata berbasis teknologi digital, serta pengembangan <i>Tourism Information Center</i> (TIC)

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Renstra PD	
3	1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;	Peningkatan nilai survey kepuasan masyarakat penerima layanan di Perangkat daerah	1	Penyelenggaraan tertib manajemen kinerja Perangkat Daerah
	2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;		2	Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan dan barang milik daerah pada Perangkat Daerah
	3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;		3	Penyelenggaraan tertib administrasi umum dan kepegawaian Perangkat Daerah
	4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Semarang;			
	5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043			

Sumber: Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 2025-2029

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen formal berisi kesepakatan antara Bupati Semarang dan Kepala Dinas Pariwisata, yang menyatakan komitmen untuk mencapai target kinerja, terukur, dan jelas dalam jangka waktu tahun 2025. Perjanjian kinerja berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja, akuntabilitas, dan penilaian keberhasilan atau kegagalan sasaran. Serta bertujuan Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Dinas Pariwisata sebagai wujud nyata komitmen terhadap Pemerintah Daerah.

2.2.1. Perjanjian Kinerja berdasarkan RENSTRA 2021–2026

Berikut target indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan RENSTRA 2021-2026:

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Tahun 2025 Berdasarkan RENSTRA 2021-2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	10,4
		Pertumbuhan Sektor Pariwisata	%	4,6 - 5,6
	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	17,0
2	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Skor Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,2
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	%	100

2.2.2. Perjanjian Kinerja berdasarkan RENSTRA 2025-2029

Berikut target indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan RENSTRA 2025-2029:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Tahun 2025 Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
	Tujuan			
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,362
	Sasaran			
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Pembangunan Daerah	Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	10,30
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah	Nilai SKM	Nilai	85,10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, melalui laporan pelaksanaan program dan kegiatan dengan target indikator yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah secara periodik. Ini melibatkan pelaporan kinerja secara terukur, transparan, dan berorientasi hasil melalui sistem (SAKIP) guna meningkatkan kinerja serta kepercayaan publik.

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Proses pelaksanaannya melalui rangkaian yang sistematis yang meliputi perencanaan strategis (Renstra/Renja), perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas kinerja tidak hanya penggunaan atau realisasi anggaran, tetapi lebih kepada capaian *outcomes* (hasil) dari program dan kegiatan yang telah dijalankan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi adalah hasil akhir dari totalitas pekerjaan yang dicapai, baik secara kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Ini merupakan indikator keberhasilan organisasi, yang digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menentukan predikat kinerja. Capaian kinerja diukur dari sejauh mana target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja berhasil dicapai. Komponen nilai atau capaian kinerja meliputi hasil kinerja kuantitatif (menggunakan angka dan statistik) dari berbagai perspektif, seperti sasaran

strategis dan target organisasi baik individu maupun unit. Proses capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, meliputi tahapan antara lain sebagai berikut:

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam “ **skala nilai** “ peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 91%	Sangat Tinggi
2	≥76–90,99%	Tinggi
3	≥66–75,99%	Sedang
4	≥51–65,99%	Rendah
5	Kurang dari 50,99%	Sangat Rendah

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Tahun anggaran 2025 merupakan tahun peralihan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, sehingga dalam penentuan capaian indikator kinerja berdasarkan 2 (dua) dokumen perencanaan (RENSTRA dan RPJMD) periode awal (Tahun 2021 – 2026) dan baru (Tahun 2025 – 2029). Penilaian capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. Berdasarkan RENSTRA Periode Tahun 2021-2026

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	10,4	-12,02	-115,58
		Pertumbuhan sektor pariwisata	4,6 - 5,6	10,28	183,57
2	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	17,0	4,19	24,65
3	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Skor Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	73,2	80,72	110,27
4	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	100	100	100

Sumber data: Dinas Pariwisata, BKuD & BPS Kab. Semarang

Pada tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator pertumbuhan sektor pariwisata yaitu sebesar 183,57%, sedangkan indikator yang mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami capaian penurunan terendah adalah persentase peningkatan PAD sektor pariwisata sebesar -115,58%.

- b. Perbandingan capaian kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Kinerja	Realisasi 2025	% Capaian
1	Tujuan: Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	11,2	17,31	9,743	-12,02	-123,37
2	Sasaran: Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	10,5	7,4	6,6 - 7,6	10,28	135,26
3		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	8,2	22,54	6,12	4,19	68,46

Sumber data: Dinas Pariwisata, BAPPERIDA, BKuD & BPS Kab. Semarang

Pada tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator pertumbuhan PDRB sektor pariwisata yaitu sebesar 135,26%, sedangkan indikator yang mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami capaian penurunan terendah adalah persentase peningkatan PAD sektor pariwisata sebesar -123,37%.

Tabel 3.4 Realisasi Presentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata

No	Uraian	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
1	Pajak Hotel	8.486.163.434	9.976.419.655	11.296.400.048	10.026.708.859
2	Pajak Restoran	17.629.046.100	22.884.436.715	25.479.045.418	26.385.305.500
3	Pajak Hiburan	9.909.577.361	9.691.128.473	15.625.388.418	9.476.707.767
4	Retribusi Daerah Dinas Pariwisata	11.797.330.500	10.636.650.000	9.997.283.000	9.010.987.300
5	PAD Sektor Pariwisata	47.822.117.395	53.188.634.843	62.398.116.884	54.899.709.426
	Prosentase peningkatan PAD sektor pariwisata $= (n - (n-1)) / (n-1) \times 100\%$		11,22	17,31	-12,02

Sumber data: Dinas Pariwisata & BKuD Kab. Semarang

Pada tabel 3.4 adalah penjelasan rinci pertumbuhan capaian indikator persentase peningkatan PAD sektor pariwisata mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025.

Tabel 3.5 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Tahun 2023-2025

Uraian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Wisatawan Nusantara	3.848.816	3.531.786	4.328.318	4.506.002
Wisatawan Mancanegara	1.123	2.344	2.333	5.943
Jumlah Wisatawan	3.849.939	3.534.130	4.330.651	4.511.945
% Pertumbuhan $= (n - (n-1)) / (n-1) \times 100\%$		-8,20	22,54	4,19

Sumber data: Dinas Pariwisata

Pada tabel 3.5 adalah penjelasan rinci pertumbuhan capaian indikator persentase peningkatan kunjungan wisata dari tahun 2023 sampai dengan 2025.

- c. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam RPJMD

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target dalam RPJMD Berdasarkan RPJMD 2021-2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi 2025	% Capaian
1	Tujuan: Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	9,743	-12,02	-123,37
2	Sasaran: Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,6 - 7,6	10,28	135,26
3		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	6,12	4,19	68,46

Sumber data: Dinas Pariwisata, BAPPERIDA, BKuD & BPS Kab. Semarang

Pada tabel 3.6 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator pertumbuhan PDRB sektor pariwisata yaitu sebesar 135,26%, sedangkan indikator yang mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami capaian penurunan terendah adalah persentase peningkatan PAD sektor pariwisata sebesar -123,37%.

d. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Tabel 3.7 Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi 2025	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	% Capaian Target	% Capaian Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=4/7*100$	$11=5/8*100$	$12=6/9*100$
1	Tujuan: Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	9,743	-12,02	-123,37	0,26	0,19	73,07	3747,31	-6326,3	-168,84
2	Tujuan: Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,6 - 7,6	10,28	135,26	7,5	7,98	106,40	101,33	128,8	127,13
3	Sasaran: Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	6,12	4,19	68,46	10,00	10,71	107,20	61,20	39,12	63,78

Pada tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator pertumbuhan PDRB sektor pariwisata yaitu sebesar 127,13%, sedangkan indikator yang mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami capaian penurunan terendah adalah persentase peningkatan PAD sektor pariwisata sebesar -168,84%.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021-2026

N O	IKU	TARGE T	REALISA SI	CAPAIAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIEN SI
1	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	9,743	-12,02	-123,37	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.194.496.900	8.229.163.364	89,50	tidak efisien
2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	6,12	4,19	68,46	Program Pemasaran Pariwisata	1.394.254.700	1.389.976.745	99,69	tidak efisien
3	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,6 - 7,6	10,28	135,26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	393.397.000	392.793.000	99,85	efisien
4	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	6.475.581.400	5.648.378.389	87,23	efisien

Pada tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat efisiensi tertinggi penggunaan sumber daya terdapat pada program Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan perhitungan = ((output kinerja/input anggaran) x 100)) - 100 atau sebesar 35,47% (diatas 0%). Sedangkan 2 program lainnya tidak efisien.

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025:
- Dari tabel 3.2 diatas, capaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:
- 1) Capaian indikator presentase peningkatan PAD sektor Pariwisata **“sangat rendah”**, prosentase realisasi 2025 sebesar -12,02% diperoleh dari PAD sektor pariwisata tahun anggaran 2025 sejumlah Rp 54.899.709.426,- dari realisasi 2024 sejumlah Rp 62.398.116.884,-
 - 2) Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang, realisasi indikator Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata di tahun 2025 yaitu sebesar 10,28% dari target sebesar 4,6 – 5,6% atau dengan prosentase capaian 183,57%. Sehingga dapat disimpulkan capaian indikator pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun ini **“sangat tinggi”**.
 - 3) Capaian indikator presentase peningkatan kunjungan wisatawan **“sangat rendah”**, karena jumlah wisatawan tahun 2025 sebanyak 4.511.945 orang sedangkan wisatawan tahun 2024 sebanyak 4.330.651 orang atau realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,19% dan capaian indikatornya sebesar 24,65% dari target kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu 17,0%.
 - 4) Karena pada tahun 2025 belum ada hasil capaiannya atau penilaian dari tim APIP, maka pencapaian ini mengacu pada hasil penilaian tahun 2024 dengan nilai 80,72. Jadi jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 73,2 maka prosentase capaiannya sebesar 110,27%. Dengan nilai tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa

capaian indikator skor evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata “**sangat tinggi**”.

5) Capaian persentase Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Tahun 2025 secara rinci dijelaskan dalam point berikutnya.

b. Perbandingan capaian kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir. Dari tabel 3.3 diatas, capaian Indikator Kinerja Utama dapat disimpulkan bahwa:

1) Capaian IKU presentase peningkatan PAD sektor pariwisata mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2023.

Dari tabel 3.4 diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi prosentase peningkatan PAD sektor pariwisata mengalami trend yang tidak stabil atau fluktuatif (naik turun).

2) Pada indikator pertumbuhan PDRB sektor pariwisata meskipun realisasi setiap tahunnya melampaui target pada RENSTRA atau capaian “**sangat tinggi**”, tetapi dapat disimpulkan dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan.

3) Pada capaian indikator presentase peningkatan kunjungan wisata mengalami trend yang tidak stabil atau fluktuatif (naik turun). Berikut rincian realisasi kunjungan wisatawan seperti yang ada pada tabel 3.5;

- 2023 = 3.534.130 orang wisatawan
- 2024 = 4.330.651 orang wisatawan
- 2025 = 4.511.945 orang wisatawan

c. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam RPJMD

Dari tabel 3.6 diatas, capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dengan target dalam RPJMD 2021-2026 dapat disimpulkan bahwa;

1) Capaian indikator persentase peningkatan PAD sektor pariwisata sebesar -123,37% atau dalam kriteria nilai yang **“sangat rendah”**. Pencapaian ini dijelaskan dengan rincian realisasi PAD sektor pariwisata pada tabel 3.4 diatas.

2) Capaian pertumbuhan PDRB sektor pariwisata di tahun 2025 realisasinya yaitu sebesar 10,28% dari target 2025 sebesar 6,6–7,6% atau dengan prosentase capaian 135,26%. Sehingga dapat disimpulkan capaian indikator pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun ini **“sangat tinggi”**.

3) Capaian indikator presentase peningkatan kunjungan wisatawan **“sedang”**, karena jumlah wisatawan tahun 2025 sebanyak 4.511.945 orang sedangkan wisatawan tahun 2024 sebanyak 4.330.651 orang atau realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,19% dan capaian indikatornya sebesar 68,46% dari target kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu 6,12%.

d. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota, dari berbagai sumber pembandingan dengan rumus perhitungannya adalah membandingkan target, realisasi dan capaian Dinas Pariwisata terhadap target, realisasi dan capaian standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain. Dari tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata dan Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dari dokumen LKjIP dinporapar Kab. Pekalongan 2024 menunjukkan hasil

yang signifikan. Sementara untuk Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata realisasi tahun 2025 Kabupaten Semarang sebesar 10,28% sedangkan dari sumber “Kajian Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Tengah” tahun 2023 realisasi sebesar 7,98% atau dengan capaian 127,13%.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi dalam suatu program atau kegiatan dengan melihat hubungan antara input dan output serta memanfaatkan data dari indikator kinerja, target realisasi anggaran. Rumus dasar:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output Realisasi Kinerja)}}{\text{Input Realisasi Anggaran)}} \times 100\%$$

Dari tabel 3.8 diatas disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator Kinerja Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata dan Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan menyebutkan hasil yang “Tidak Efisien”. Sedangkan indikator Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah menyatakan hasil yang “Efisien”.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Tujuan: Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata Sasaran: Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	9,743	-12,02	-123,37	- Pajak Restoran yang mengalami peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, untuk sub sektor wisata lainnya (Pajak hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi yang dikelola Dinas Pariwisata) mengalami penurunan	- Kerjasama dengan stakeholder pariwisata di Kab. Semarang dan Kab./Kota lain sekitarnya, meliputi promosi pariwisata - Koordinasi dengan BKuD Kabupaten Semarang dalam pemenuhan data realisasi PAD.
2		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	6,12	4,19	68,46	- Terlambatnya ketersediaan data, karena DTW non Pemerintah Daerah sebagai sumber data terlambat memberikan data kunjungan wisata - Belum semua DTW dan Desa Wisata masuk ke sistem Sisdaporapar - Tingkat Kunjungan wisata di tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024	- Pengoptimalan realisasi capaian kunjungan wisata melalui monitoring dan evaluasi ke DTW sebagai sumber data kunjungan wisata - Personil Bidang Destinasi Dinas Pariwisata melakukan jemput bola ke DTW dan Desa Wisata untuk pemenuhan data kunjungan wisatawan - Rapat sosialisasi dan koordinasi pemenuhan data kunjungan wisatawan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
3		Pertumbuhan sektor pariwisata	6,6 - 7,6	10,28	135,26	Perhitungan realisasi dan capaian indikator kinerja bergantung pada instansi lain, ketiadaan SDM dan sumber data sebagai alat ukur capaian indikator	Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang
4	Tujuan: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah Sasaran: Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Skor Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kerja - Terlaksananya pelayanan umum sesuai SOP - Terlaksananya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan - Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 	Peningkatan program kerja berkelanjutan, yang mencakup akuntabilitas kinerja, kapasitas SDM/pegawai dan pelayanan umum serta pemeliharaan sarana prasarana Dinas Pariwisata

Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya pengembangan potensi destinasi pariwisata berkelanjutan	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	-123,37	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama tinggal wisatawan nusantara/ mancanegara	89,74% / 96,31%	Menunjang
2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	68,46	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	132,83	Menunjang
3	Meningkatnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif terbina	Pertumbuhan sektor pariwisata	135,26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi	67,07	Menunjang
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah yang disusun	100	Menunjang

Pada tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa keberhasilan indikator terletak pada pertumbuhan PDRB sektor pariwisata sebesar 135,26% dan skor evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100%, sedangkan kegagalan terletak pada capaian indikator persentase peningkatan PAD sektor pariwisata dan persentase peningkatan kunjungan wisata.

Pada tabel 3.10 disimpulkan bahwa indikator program kegiatan menunjang capaian indikator kinerja walaupun tidak signifikan terhadap realisasi.

1. Presentase peningkatan PAD sektor Pariwisata

a) Penunjang keberhasilan;

- Adanya koordinasi dengan BKuD Kabupaten Semarang dalam pemenuhan data realisasi PAD.
- Meningkatnya capaian PAD realisasi sektor pariwisata di pajak rumah makan/restaurant dibandingkan tahun lalu.

b) Penghambat/kegagalan;

- Menurunnya capaian realisasi pajak Hotel, Hiburan dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pariwisata dibandingkan tahun lalu.

2. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

a) Penunjang keberhasilan;

- Capaian indikator berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

b) Penghambat/kegagalan;

- Kurangnya ketersediaan SDM dalam pengumpulan data dan perhitungan capaian indikator.

3. Presentase peningkatan kunjungan wisata

a) Penunjang keberhasilan;

- Tersedianya aplikasi “SISDAPORAPAR” sebagai media perhitungan data kunjungan wisata milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Monitoring dan evaluasi bidang Destinasi Pariwisata ke DTW dalam sosialisasi pemenuhan data kunjungan wisata.
- Rapat koordinasi dengan DTW sebagai sumber data untuk percepatan pengumpulan data kunjungan wisata di Dinas Pariwisata.

b) Penghambat/kegagalan;

- Terlambatnya pemenuhan data kunjungan wisata dari sumber data atau DTW non pemerintah daerah.
- Belum semua DTW dan Desa Wisata masuk ke dalam sistem SISDAPORAPAR.
- Tren penurunan kunjungan wisata dari tahun 2022.
- Akses menuju DTW yang kurang baik, baik keadaan jalan maupun penunjuk jalan menuju DTW karena lebih banyak tujuan wisata di Kabupaten Semarang dalam kategori wisata alam dan buatan.

4. Berdasarkan RENSTRA Periode Tahun 2025-2029

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.11 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja 2025	Realisasi 2025	% Capaian
	Tujuan				
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3,39	3,51	103,54
	Sasaran				
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Pembangunan Daerah	Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD	10,30	7,41	71,94
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah	Nilai SKM	85,10	85,00	99,88

Sumber data: Dinas Pariwisata, BKuD & BPS Kab. Semarang

Pada tabel 3.11 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 103,54%, sedangkan indikator yang mengalami pertumbuhan rendah adalah kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 71,94%.

- b. Perbandingan capaian kinerja utama antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.12 Perbandingan capaian kinerja utama antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Kinerja	Realisasi 2025	% Capaian
1	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3,278	3,359	3,39	3,51	103,54
2	Sasaran: Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	10,03	10,44	10,3	7,41	71,94

Sumber data: Dinas Pariwisata, BAPPERIDA, BKuD & BPS Kab. Semarang

Pada tabel 3.12 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 103,54%, sedangkan indikator yang mengalami pertumbuhan rendah adalah kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 71,94%.

- c. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Dalam RPJMD

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Dalam RPJMD

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi 2025	% Capaian
1	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3,39	3,51	103,54
2	Sasaran: Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	10,3	7,41	71,94

Sumber data: Dinas Pariwisata, BAPPERIDA, BKuD & BPS Kab. Semarang

Pada tabel 3.13 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 103,54%, sedangkan indikator yang mengalami pertumbuhan rendah adalah kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 71,94%.

- d. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kab.Kota

Pada tabel 3.14 dibawah dapat disimpulkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 114,90%, sedangkan indikator yang mengalami pertumbuhan rendah adalah kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 98,5%.

**Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kab.Kota**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi 2025	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	% Capaian Target	% Capaian Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=4/7*100$	$11=5/8*100$	$12=6/9*100$
1	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3,39	3,51	103,54	1,5 - 2,5	2,25	90,14	135,6	156,00	114,90
2	Sasaran: Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	10,3	7,41	71,94	0,26	0,19	73,07	3961,5	3900,0	98,5

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029**

NO	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3,39	3,51	103,54	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	393.397.000	392.793.000	99,85	efisien
2	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	10,3	7,41	71,94	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.194.496.900	8.229.163.364	89,50	tidak efisien
					Program Pemasaran Pariwisata	1.394.254.700	1.389.976.745	99,69	tidak efisien
3	Skor Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	73,2	80,72	110,27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.475.581.400	5.648.378.389	87,23	efisien

Pada tabel 3.15 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat efisiensi tertinggi penggunaan sumber daya terdapat pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan perhitungan = $((\text{output kinerja}/\text{input anggaran}) \times 100) - 100$ atau sebesar 26,42% (diatas 0%). Sedangkan 1 program lainnya tidak efisien.

Berikut merupakan penjelasan dari tabel-tabel diatas:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

Dari tabel 3.11 diatas, capaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pada capaian indikator rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang Tahun 2025 adalah sebesar 3,51%, dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 3,39% atau disimpulkan capaian tahun 2025 ini sebesar 103,54%. Dapat disimpulkan bahwa pada capaian indikator rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB diklasifikasikan pada capaian **“sangat baik”**.
- 2) Capaian kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD memiliki kriteria penilaian **“sedang”**. Dari target tahun 2025 sebesar 10,3% dengan realisasi sebesar 7,41% sehingga capaian sebesar 71,94%.

- 3) Capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM untuk tahun 2025 belum rilis atau masih dalam proses. Jika mengacu pada realisasi tahun 2024 sebesar 85,00 dari target tahun 2025 sebesar 85,10 sehingga pencapaian indikator ini sebesar 99,88%. Disimpulkan bahwa pada capaian indikator nilai SKM Dinas Pariwisata dalam klasifikasi “**sangat baik**”.
- b. Perbandingan capaian kinerja utama antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.
- Dari tabel 3.12 diatas indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:
- 1) Realisasi rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang Tahun 2025 adalah sebesar 3,51%, dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 3,39% atau disimpulkan capaian tahun 2025 ini sebesar 103,54%. Dapat disimpulkan bahwa pada indikator rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
 - 2) Realisasi kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Semarang mengalami tren yang tidak stabil atau fluktuatif (naik turun).
- c. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Dalam RPJMD

Dari tabel 3.13 diatas capaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Realisasi rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang pada tahun 2025 adalah sebesar 3,51% dan target kinerja pada RPJMD 2025-2030 sebesar 3,39%. Maka prosentase capaian sebesar 103,54%. Jadi dapat disimpulkan rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB kabupaten Semarang “**sangat baik**”.
 - 2) Realisasi kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa dalam klasifikasi nilai yang “**sedang**” dari prosentase capaian sebesar 71,94%. Capaian tersebut dihasilkan dari realisasi PAD sektor pariwisata sebanyak Rp54.899.709.426,- dari jumlah realisasi PAD Kabupaten Semarang sebanyak Rp740.760.386.215,-.
- d. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kab.Kota. Dari tabel 3.14 diatas disimpulkan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum secara nasional seringkali berada di kisaran 1,5% - 2,5% dari total PDB/PDRB, terutama setelah pemulihan sektor pariwisata, target dinas Pariwisata sebesar 3,39%. Sementara untuk indikator Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD

perbandingan capaian tidak signifikan capaian pariwisata Kabupaten Semarang sebesar 71,94% dan capaian dari dokumen LKjIP Dinporapar Kabupaten Pekalongan 2024 sebesar 73,07%.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi dalam suatu program atau kegiatan dengan melihat hubungan antara input dan output serta memanfaatkan data dari indikator kinerja, target realisasi anggaran. Rumus dasar:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output Realisasi Kinerja})}{\text{Input Realisasi Anggaran})} \times 100\%$$

Dari tabel 3.15 diatas disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator Kinerja Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD dan menyebutkan hasil yang “Tidak Efisien”. Sedangkan indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB dan Skor Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah menyatakan hasil yang “Efisien”.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja antara sebagai berikut:

Tabel 3.16 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3,39	3,51	103,54	Perhitungan realisasi dan capaian indikator kinerja bergantung pada instansi lain, ketiadaan SDM dan sumber data sebagai alat ukur capaian indikator	Koordinasi dengan Badan pusat Statistik Kabupaten Semarang
2	Sasaran: Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	10,30	7,41	71,94	- Pajak Restoran yang mengalami peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, untuk sub sektor wisata lainnya (Pajak hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi yang dikelola Dinas Pariwisata) mengalami penurunan	- Kerjasama dengan stakeholder pariwisata di Kab. Semarang dan Kab./Kota lain sekitarnya, meliputi promosi pariwisata - Koordinasi dengan BKuD Kabupaten Semarang dalam pemenuhan data realisasi PAD.
3	Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah	Nilai SKM	73,2	80,72	110,27	- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kerja - Terlaksananya pelayanan umum sesuai SOP - Terlaksananya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan - tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Peningkatan program kerja berkelanjutan, yang mencakup akuntabilitas kinerja, kapasitas SDM/pegawai dan pelayanan umum serta pemeliharaan sarana prasarana Dinas Pariwisata

Tabel 3.17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	103,54	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan potensi destinasi pariwisata berkelanjutan	19,95	Menunjang
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	4,19	Menunjang
2	Sasaran: Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	71,94	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif terbina	3,64	Menunjang
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah	Nilai SKM	110,27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	80,72	Menunjang

Pada tabel 3.16 dapat disimpulkan bahwa keberhasilan indikator terletak pada rasio PDRB akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 103,54% dan nilai SKM sebesar 110,27%, sedangkan kegagalan terletak pada capaian indikator kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD yang sebesar 71,94%.

Pada tabel 3.17 disimpulkan bahwa indikator program kegiatan menunjang capaian indikator kinerja walaupun tidak signifikan terhadap realisasi.

1) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB;

a) Penunjang keberhasilan;

- Capaian indikator berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

b) Penghambat/kegagalan;

- Kurangnya ketersediaan SDM dalam pengumpulan data dan perhitungan capaian indikator

2) Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD;

a) Penunjang keberhasilan;

- Adanya koordinasi dengan BKuD Kabupaten Semarang dalam pemenuhan data realisasi PAD.
- Meningkatnya capaian PAD realisasi sektor pariwisata di pajak rumah makan/restaurant dibandingkan tahun lalu.

b) Penghambat/kegagalan;

- Menurunnya capaian realisasi pajak Hotel, Hiburan dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pariwisata dibandingkan tahun lalu.

3) Skor Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;

a) Penunjang keberhasilan;

- Tersusunnya dokumen evaluasi SAKIP sesuai sistematika yang telah ditentukan.

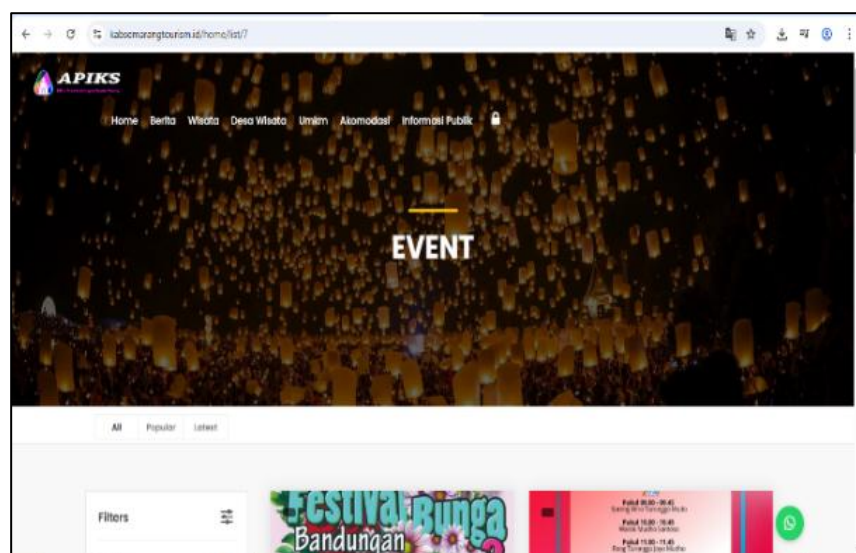
b) Penghambat/kegagalan;

- Kurang lengkapnya pemenuhan beberapa data dukung dokumen evaluasi SAKIP.

3.1.3. Inovasi

Inovasi Dinas Pariwisata saat ini berfokus pada transformasi digital dan pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan kunjungan serta pengalaman wisatawan sehingga tercapainya peningkatan PAD sektor pariwisata. Beberapa program dan kegiatan inovasi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang pada Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

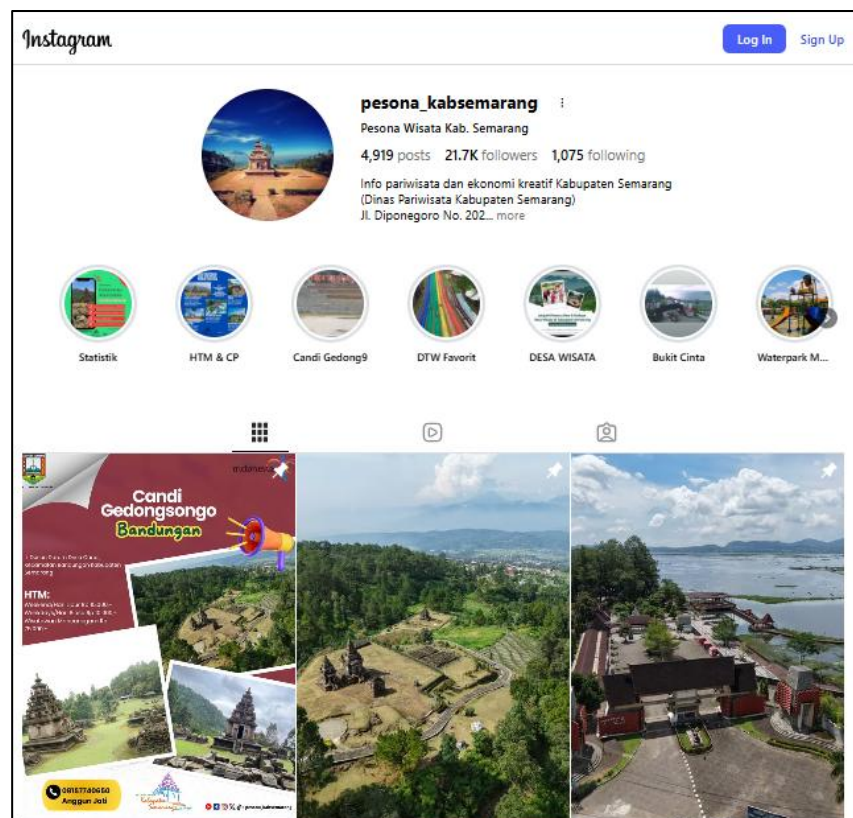
- a. Pemasaran wisata yang lebih efisien melalui melalui promosi wisata melalui media sosial.



Gambar 3.1 Website Dinas Pariwisata (kabsemarangtourism.id)



Gambar 3.2 Podcast Youtube



Gambar 3.3 Instagram Dinas Pariwisata (@pesona_kabsemarang)

- b. Event di DTW diantaranya Festival Gedongsongo, festival Bukit Cinta, Lomba ekonomi kreatif pariwisata di DTW Bukit Cinta, atraksi wisata dan budaya di setiap DTW.



Gambar 3.4 Acara Malam Puncak Festival Gedongsongo



Gambar 3.5 Acara Jamasan Candi pada Festival Gedongsongo



Gambar 3.6 Festival Rawa Pening



Gambar 3.7 Acara Lomba Tari pada Festival Rawa Pening



Gambar 3.8 Acara Festival Ekonomi Kreatif

3.1.4. Penghargaan

Pemberian apresiasi bagi insan pariwisata oleh Pemerintah Provinsi, Kementerian Pariwisata ataupun pusat sebagai upaya memajukan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Keikutsertaan pelaku wisata Kabupaten Semarang dalam berbagai kategori kompetisi kepariwisataan, selain menunjukkan potensi wisata juga sebagai sarana promosi wisata khususnya peserta maupun wisata Kabupaten Semarang. Meskipun penghargaan tidak diterima oleh Dinas Pariwisata, berikut beberapa penghargaan yang diterima Pelaku wisata binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang:

Tabel 3.18 Penghargaan Pelaku Wisata Kabupaten Semarang

No	KATEGORI PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Wonderfull Indonesia Awards	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia	05-Des-25	Juara Harapan I Pokdarwis Rukun Santoso Desa Lerep Ungaran Barat (Kategori Pokdarwis Terbaik Nasional Tahun 2025)
2	Jambore Pokdarwis Jawa Tengah	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	17 – 18 Mei 2025	Desa Asinan, Kecamatan Bawen memperoleh Juara III Pokdarwis Svargan Jaghat Anugraha (Lomba Apresiasi dan Konvensi Kelembagaan)
3	Jambore Pokdarwis Jawa Tengah	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	17 – 18 Mei 2025	Desa Asinan, Kecamatan Bawen memperoleh Juara Harapan I Pokdarwis Svargan Jaghat Anugraha (Lomba Atraksi Kesenian)
4	Semarak Kabupaten Kota Kreatif Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	14 – 15 Juni 2025	Kabupaten Semarang memperoleh Juara Harapan 2, Komite Ekonomi Kreatif (Stand Pameran Kabupaten Kota Kreatif)

Berikut data dukung penghargaan pelaku wisata Kabupaten Semarang tahun 2025:



Gambar 3.9 Piala Lomba Apresiasi dan Konvensi Kelembagaan Pokdarwis



Gambar 3.10 Piala Lomba Atraksi Kesenian



Gambar 3.11 Piagam Penghargaan Lomba Apresiasi dan Konvensi



Gambar 3.12 Piagam Penghargaan Lomba Atraksi Kesenian

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata mengikuti semua proses perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Berikut penjelasan target dan realisasi APBD Dinas Pariwisata tahun anggaran 2025:

A. Anggaran Pendapatan TA 2025

Target penetapan pendapatan Dinas pariwisata tahun 2025 sebesar Rp14.962.611.000,- dan mengalami penurunan sekitar 19,22% atau menjadi Rp12.086.861.000,-. Realisasi pendapatan tahun 2025 sebanyak Rp9.010.987.300,- atau sebesar 74,55% dari target perubahan. Secara rinci target dan realisasi persub rekening pendapatan dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 3.19 Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Dinas Pariwisata

OBJEK RETRIBUSI	TARGET PENETAPAN 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	SISA TARGET BELUM TEREALISASI
2	3	4	5	$6 = 5/4 \times 100$	$7 = 4 - 5$
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.962.611.000	12.086.861.000	9.010.987.300	74,55	3.075.873.700
HASIL RETRIBUSI DAERAH	14.948.611.000	12.072.861.000	8.996.986.300	74,52	3.075.874.700
RETRIBUSI JASA UMUM	33.240.000	33.240.000	34.050.000	102,44	(810.000)
RETRIBUSI JASA USAHA	14.915.371.000	12.039.621.000	8.962.936.300	74,45	3.076.684.700
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	33.240.000	33.240.000	34.050.000	102,44	(810.000)
Pelayanan Persampahan di 5 DTW dan Alun-alun Bung Karno Kalirejo dan Tambakboyo Ambarawa	33.240.000	33.240.000	34.050.000	102,44	(810.000)
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	647.120.000	477.120.000	500.884.300	104,98	(23.764.300)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	220.000.000	50.000.000	30.600.000	61,20	19.400.000
Sewa Gedung Serbaguna Alun-Alun Bung Karno Kalirejo	220.000.000	50.000.000	30.600.000	61,20	19.400.000
Retribusi Penyewaan Tanah	184.000.000	184.000.000	231.784.300	125,97	(47.784.300)
Permainan Alun-Alun Bung Karno Kalirejo	37.740.000	37.740.000	37.740.000	100,00	-
Permainan Lainnya	4.950.000	4.950.000	5.100.000	103,03	(150.000)
PKL "Gotong Royong" Alun-Alun Bung Karno Kalirejo	13.500.000	13.500.000	12.000.000	88,89	1.500.000
PKL Dihakiri Minggu Alun-Alun Bung Karno Kalirejo	10.800.000	10.800.000	18.524.000	171,52	(7.724.000)

OBJEK RETRIBUSI	TARGET PENETAPAN 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	SISA TARGET BELUM TEREALISASI
2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$	$7 = 4 - 5$
PKL "Pakarti" Alun-Alun Bung Karno Kalirejo	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100,00	-
Kegiatan Komersial Lainnya	36.000.000	36.000.000	73.975.300	205,49	(37.975.300)
Kandang Kuda di DTW. Candi Gedongsongo	5.110.000	5.110.000	5.040.000	98,63	70.000
Menara Telekomunikasi di DTW. Candi Gedongsongo	64.800.000	64.800.000	64.800.000	100,00	-
PKL Alun-alun Tambakboyo Ambarawa	6.000.000	6.000.000	9.505.000	158,42	(3.505.000)
Retribusi Penyewaan Bangunan	243.120.000	243.120.000	238.500.000	98,10	4.620.000
Kios DTW. Candi Gedong Songo	94.320.000	94.320.000	95.100.000	100,83	(780.000)
Kios DTW. Pemandian Muncul	17.280.000	17.280.000	14.040.000	81,25	3.240.000
Kios DTW. Bukit Cinta	35.280.000	35.280.000	33.840.000	95,92	1.440.000
Kios DTW. Waterpark Muncul	23.760.000	23.760.000	25.380.000	106,82	(1.620.000)
Kios Alun-Alun Tambakboyo	38.880.000	38.880.000	36.540.000	93,98	2.340.000
Los Pujasera Alun-Alun Bung Karno Kalirejo	33.600.000	33.600.000	33.600.000	100,00	-
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.288.501.000	1.288.501.000	1.161.532.000	90,15	126.969.000
Parkir DTW. Candi Gedongsongo	324.830.000	324.830.000	389.796.000	120,00	(64.966.000)
Parkir DTW. Pemandian Muncul	158.119.000	158.119.000	46.800.000	29,60	111.319.000
Parkir DTW. Waterpark Muncul	158.480.000	158.480.000	158.484.000	100,00	(4.000)
Parkir Alun-Alun Bung Karno Kalirejo	420.120.000	420.120.000	420.120.000	100,00	-

OBJEK RETRIBUSI	TARGET PENETAPAN 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	SISA TARGET BELUM TEREALISASI
2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$	$7 = 4 - 5$
Parkir Alun-Alun Tambakboyo Ambarawa	95.074.000	95.074.000	19.950.000	20,98	75.124.000
Parkir DTW. Bukit Cinta	114.331.000	114.331.000	112.512.000	98,41	1.819.000
Parkir DTW. Museum Palagan Ambarawa	17.547.000	17.547.000	13.870.000	79,04	3.677.000
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata & Olahraga	12.979.750.000	10.274.000.000	7.300.520.000	71,06	2.973.480.000
DTW. Gedong Songo + Kolam Air Panas	7.695.500.000	6.049.500.000	3.530.060.000	58,35	2.519.440.000
DTW. Pemandian Muncul	1.275.000.000	1.275.000.000	1.312.050.000	102,91	(37.050.000)
DTW. Bukit Cinta Brawijaya	2.787.750.000	2.150.500.000	1.721.835.000	80,07	428.665.000
DTW. Musium Palagan Ambarawa	211.500.000	150.000.000	119.655.000	79,77	30.345.000
DTW. Waterpark Muncul	1.010.000.000	649.000.000	616.920.000	95,06	32.080.000
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	14.000.000	14.000.000	14.001.000	100,01	(1.000)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	14.000.000	14.000.000	14.001.000	100,01	(1.000)
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	14.000.000	14.000.000	14.001.000	100,01	(1.000)
Fasilitas Umum (MCK Alun-Alun Bung Karno Kalirejo)	14.000.000	14.000.000	14.001.000	100,01	(1.000)
JULAH	14.962.611.000	12.086.861.000	9.010.987.300	74,55	3.075.873.700

Sumber data: Dinas Pariwisata

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah prosentase realisasi pendapatan sebesar 74,55% atau dalam klasifikasi nilai capaian “**sedang**”. Realisasi terendah terletak pada retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga dengan capaian 71,06% dari jumlah realisasi pendapatan sebanyak Rp7.300.520.000,- dari target perubahan 2025 sebesar Rp10.274.000.000,-. Lebih spesifik dari 5 (lima) Daerah Tujuan Wisata (DTW) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang dikelola Dinas Pariwisata, DTW Candi Gedongsongo dengan realisasi pendapatan yang terendah. Target pendapatan sebesar Rp6.049.500.000 dan realisasi sebesar Rp3.530.060.000 atau 58,35%.

Evaluasi semester pertama tahun 2025 atas realisasi pendapatan DTW Candi Gedongsongo sudah dilakukan, dengan melihat tren realisasi pendapatan dalam 3 tahun terakhir yang selalu menurun. Upaya yang telah dilakukan adalah usulan perubahan atau penurunan target pendapatan. Beberapa faktor tidak tercapainya target pendapatan Dinas Pariwisata antara lain sebagai berikut;

1. Kurang efektifnya penentuan target pendapatan baik target penetapan maupun target perubahan tahun anggaran 2025.
2. Penurunan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Semarang yang berpengaruh juga pada realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Pariwisata.
3. Akses menuju DTW khususnya di Candi Gedongsongo yang dipengaruhi juga cuaca yang tidak menentu sehingga minat kunjungan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target pendapatan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemasaran wisata yang lebih efisien melalui melalui promosi wisata melalui media sosial.
2. Event di DTW diantaranya Festival Gedongsongo, festival Bukit Cinta, Lomba ekonomi kreatif pariwisata di DTW Bukit Cinta, atraksi wisata dan budaya di setiap DTW.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung di DTW,

B. Anggaran Belanja TA 2025

Struktur anggaran belanja Dinas Pariwisata terdiri dari 4 (empat) program (3 Bidang urusan pariwisata dan 1 program penunjang urusan pemerintah Daerah), 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Target penetapan belanja Dinas Pariwisata tahun anggaran sebesar Rp16.285.031.400,- dan target anggaran perubahan sebesar Rp17.457.730.000,- dengan jumlah realisasi belanja Rp15.660.311.498,- atau 89,70%. Beberapa penyebab sub kegiatan dengan capaian realisasi belanja di bawah 90%, antara lain sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran perubahan Rp4.813.716.000,- dan realisasi belanja Rp4.101.680.001,- atau 85,21%. Anggaran yang tidak terlaksana sebesar Rp712.035.999,- diantaranya belanja insentif bagi ASN dan Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi pariwisata dan Olahraga.
2. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran perubahan Rp15.215.000,- dan realisasi belanja Rp12.871.528,- atau 84,60%. Anggaran yang tidak terlaksana sebesar Rp2.343.472,- sebagai upaya efisiensi anggaran sesuai kebutuhan.

3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran perubahan Rp 112.486.500,- dan realisasi belanja Rp 99.263.000,- atau 88,24%. Anggaran yang tidak terlaksana sebesar Rp 13.223.500,- sebagai upaya efisiensi anggaran sesuai kebutuhan.
4. Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran perubahan Rp6.092.044.400,- dan realisasi belanja Rp 5.190.982.649,- atau 85,21%. Anggaran yang tidak terlaksana sebesar Rp901.061.751,- diantaranya belanja Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) dan upaya efisiensi anggaran sesuai kebutuhan.

Lebih jelas target anggaran penetapan, perubahan serta realisasi tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Sisa anggaran tidak terealisasi
1	2	3	4	5	6=5/4x100	7 = 4 - 5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.346.680.900	6.475.581.400	5.648.378.389	87,23	827.203.011
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.418.100	33.418.100	33.112.100	99,08	306.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.773.600	27.773.600	27.467.600	98,90	306.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.159.000	3.159.000	3.159.000	100,00	-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.485.500	2.485.500	2.485.500	100,00	-
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.922.102.500	4.859.878.500	4.147.842.501	85,35	712.035.999
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.855.940.000	4.813.716.000	4.101.680.001	85,21	712.035.999
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.113.500	42.113.500	42.113.500	100,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.049.000	4.049.000	4.049.000	100,00	-
A.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.215.000	15.215.000	12.871.528	84,60	2.343.472
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.215.000	15.215.000	12.871.528	84,60	2.343.472
A.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.673.500	15.080.000	15.068.000	99,92	12.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.673.500	15.080.000	15.068.000	99,92	12.000
A.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.211.600	370.641.600	348.431.160	94,01	22.210.440
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.850.000	164.910.000	160.404.000	97,27	4.506.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.486.500	112.486.500	99.263.000	88,24	13.223.500
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.300.000	5.300.000	5.296.000	99,92	4.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.535.000	2.535.000	2.520.000	99,41	15.000

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.040.100	85.410.100	80.948.160	94,78	4.461.940
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.090.200	1.021.378.200	933.219.677	91,37	88.158.523
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.897.700	1.897.700	1.719.700	90,62	178.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494.579.500	494.631.500	446.892.261	90,35	47.739.239
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.935.200	19.935.200	19.498.200	97,81	437.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.677.800	504.913.800	465.109.516	92,12	39.804.284
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.970.000	159.970.000	157.833.423	98,66	2.136.577
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.984.000	64.984.000	64.794.423	99,71	189.577
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.991.000	79.991.000	78.053.000	97,58	1.938.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.995.000	14.995.000	14.986.000	99,94	9.000
B	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	8.311.686.800	9.194.496.900	8.229.163.364	89,50	965.333.536
B.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	58.143.000	64.143.000	63.620.500	99,19	522.500
1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	24.595.000	24.595.000	24.072.500	97,88	522.500
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	33.548.000	39.548.000	39.548.000	100,00	-
B.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.248.926.300	6.257.790.400	5.356.428.649	85,60	901.361.751
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.089.180.300	6.092.044.400	5.190.982.649	85,21	901.061.751
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	159.746.000	165.746.000	165.446.000	99,82	300.000
B.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.004.617.500	2.872.563.500	2.809.114.215	97,79	63.449.285
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	867.946.000	806.505.381	92,92	61.440.619
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.867.010.000	1.873.010.000	1.871.806.000	99,94	1.204.000

3	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	84.490.500	84.490.500	83.685.834	99,05	804.666
4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	53.117.000	47.117.000	47.117.000	100,00	-
C	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.394.516.700	1.394.254.700	1.389.976.745	99,69	4.277.955
C.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.394.516.700	1.394.254.700	1.389.976.745	99,69	4.277.955
1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	157.142.300	139.880.300	138.862.895	99,27	1.017.405
2	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	178.432.000	178.432.000	178.356.500	99,96	75.500
3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	949.182.000	966.182.000	962.996.950	99,67	3.185.050
4	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	109.760.400	109.760.400	109.760.400	100,00	-
D	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	232.147.000	393.397.000	392.793.000	99,85	604.000
D.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	165.695.000	165.695.000	165.545.000	99,91	150.000
1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	106.728.000	106.728.000	106.628.000	99,91	100.000
2	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	19.428.000	19.428.000	19.378.000	99,74	50.000
3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	39.539.000	39.539.000	39.539.000	100,00	-
D.2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	66.452.000	227.702.000	227.248.000	99,80	454.000
1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	66.452.000	227.702.000	227.248.000	99,80	454.000
JUMLAH		16.285.031.400	17.457.730.000	15.660.311.498	89,70	1.797.418.502

Sumber data: Dinas Pariwisata

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, RENSTRA 2025-2029, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi Pemerintah Daerah dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa pencapaian 7 (empat) indikator kinerja berdasarkan RENSTRA Dinas Pariwisata, dengan kesimpulan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja RENSTRA 2021-2026

1. Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata;

Capaian indikator kinerja mengalami penurunan realisasi yang signifikan dengan realisasi PAD sektor pariwisata tahun 2025 sebesar Rp 54.899.709.426,- dari realisasi 2024 sebesar Rp 62.398.116.884,- atau -

12,02%. Capaian indikator presentase peningkatan PAD sektor Pariwisata dalam klasifikasi nilai **“sangat rendah”**

2. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata;

Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 10,28% dari target Renstra Tahun 2021-2026 sebesar 6,6 – 7,6% atau dengan prosentase capaian 135,26%. Sehingga dapat disimpulkan capaian indikator kinerja tahun ini **“sangat tinggi”**.

3. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan;

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2025 sebanyak 4.511.945 orang sedangkan tahun 2024 sebanyak 4.330.651 orang atau realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,19%. Capaian presentase peningkatan kunjungan wisatawan dalam klasifikasi nilai **“sangat rendah”**.

4. Skor Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;

Karena pada tahun 2025 belum ada hasil capaiannya atau penilaian dari tim APIP, maka pencapaian ini mengacu pada hasil penilaian tahun 2024 dengan nilai 80,72% dari target tahun 2025 sebesar 73,2% maka prosentase capaiannya sebesar 110,27%. Dapat disimpulkan bahwa capaian indikator skor evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata **“sangat tinggi”**.

B. Indikator kinerja RENSTRA 2025-2029

1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB

Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang tahun 2025 realisasi indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB adalah sebesar 3,51% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 3,39% atau disimpulkan capaian

tahun 2025 ini sebesar 103,54%. Dapat disimpulkan bahwa pada capaian indikator rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB diklasifikasikan pada capaian “**sangat baik**”.

2. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Dari target tahun 2025 capaian sebesar 10,3% dengan realisasi sebesar 7,41% sehingga capaian sebesar 71,94%, dengan realisasi PAD sektor pariwisata Rp 54.899.709.426,- dari jumlah realisasi PAD Kabupaten Semarang sebanyak Rp740.760.386.215,-. Jadi dapat disimpulkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD memiliki kriteria penilaian “**sedang**”.

3. Nilai SKM

Capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM untuk tahun 2025 belum rilis atau masih dalam proses. Jika mengacu pada realisasi tahun 2024 sebesar 85,00 dari target tahun 2025 sebesar 85,10 sehingga pencapaian indikator ini sebesar 99,88%. Disimpulkan bahwa pada capaian indikator nilai SKM dinas pariwisata dalam klasifikasi “**sangat baik**”.

4.2. SARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata bertujuan untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang berdasarkan evaluasi capaian tahun 2025. Dalam mewujudkan misi Pemerintah Daerah khususnya bidang pariwisata melalui tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memerlukan langkah-langkah strategis antara lain sebagai berikut:

1. Saran Bidang Pemasaran Pariwisata:

- a. Peningkatan digitalisasi; meningkatkan penggunaan *digital marketing* melalui media sosial dan *influencer* (travel Blogger/Vlogger) untuk menjangkau wisatawan yang lebih didominasi generasi milenial dan mancanegara secara luas.
 - b. Pengembangan produk wisata melalui paket wisata minat khusus (misalnya: *ecotourism*, wisata sejarah, atau wisata budaya) untuk meningkatkan *Length of Stay* (lama tinggal) dan *Spending* (pengeluaran) wisatawan.
 - c. Kolaborasi pemasaran dengan memperkuat kerjasama dengan stakeholder pariwisata khususnya di Kabupaten Semarang maupun Kabupaten/Kota di sekitar.
2. Saran Bidang Destinasi Pariwisata:
- a. Optimalisasi sarana prasarana penunjang destinasi milik Pemerintah daerah untuk meningkatkan dan kenyamanan wisatawan.
 - b. Pengembangan berkelanjutan seperti pengintegrasian konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi desa wisata.
 - c. Optimalisasi pemenuhan data kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang sebagai salah satu alat ukur capaian indikator kinerja.
3. Saran Bidang Industri Pariwisata:
- a. Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas SDM pariwisata melalui pembinaan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata Kabupaten Semarang.

- b. Optimalisasi *database*/basis data industri pariwisata sebagai data dukung pengukuran capaian indikator kinerja pariwisata
4. UPTD Pariwisata: peningkatan pelayanan di destinasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata agar terciptanya kenyamanan dan peningkatan kunjungan wisata, sehingga tercapainya peningkatan pendapatan sektor pariwisata.
5. Sekretariat:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: penyusunan tim pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) khususnya dalam pelayanan di Destinasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:
 - 1) Optimalisasi pengadministrasian database kepariwisataan sebagai bahan penyusunan laporan evaluasi capaian kinerja.
 - 2) Koordinasi dengan pihak terkait dalam semua penyusunan laporan evaluasi kinerja.

4.3. TINDAK LANJUT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024

Setelah dilaksanakan evaluasi AKIP oleh Tim AKIP InspektorAT Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2024 memperoleh nilai 80,72 atau peringkat “A” Memuaskan”, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon4/Pengawas/Subkoordinator, adapun rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komponen Penilaian Evaluasi AKIP

No	Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
	Perencanaan Kinerja	30,00	27,8
	Pengukuran Kinerja	30,00	20,58
	Pelaporan Kinerja	15,00	10,09
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	80,72

Menindaklanjuti surat Plt. Inspektur Kabupaten Semarang Nomor 700.1.2.1/0468.34/2025 Tanggal 21 Maret 2025 tentang Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Tahun 2024, berikut bahwa dalam upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan Dokumen AKIP, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang menyampaikan:

1. Telah secara rutin melaksanakan rapat internal POK sebagai upaya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala dalam upaya mengoptimalkan capaian kinerja.
2. Telah melakukan inventarisasi capaian terhadap rencana Aksi yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian kinerja Organisasi Dinas Pariwisata dalam kurun waktu satu tahun
3. Telah menerapkan SOP pengumpulan data kinerja sebagai bentuk standarisasi kualitas penyusunan laporan kinerja
4. Telah melakukan penyesuaian penulisan laporan sesuai dengan sistematika dan format baku penyusunan LKJIP.

Tabel 4.2 Progres Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2024

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
1	Perencanaan Kinerja	Sumber LHE AKIP Internal PD	Dokumen DPA 2024	Selesai
			Dokumen DPPA 2024	
			Renstra 2021 – 2026	
			Renja Perubahan 2024	
			Laporan Rencana Aksi 2024	
2	Pengukuran Kinerja	Sumber LHE AKIP Internal PD	Cascading indikator kinerja Dinas Pariwisata	Selesai
			SK Tim SAKIP Dinas Pariwisata	
			SOP Pengumpulan Data Kinerja Dinas Pariwisata	
3	Pelaporan Kinerja	Sumber LHE AKIP Internal PD	Dokumen LKJIP setelah review	Selesai
			Bukti upload dokumen LKJIP pada website Dinas Pariwisata (APIkS)	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Sumber LHE AKIP Internal PD	Dokumen hasil tindak lanjut rekomendasi LHE 2025 Inspektorat Kab. Semarang	Selesai

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perubahan 2025
2. Evaluasi Rencana Aksi
3. RKT
4. Berita Tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2024
5. Rekap realisasi Kunjungan Wisata tahun 2018-2025
6. Rekap realisasi kontribusi dan prosentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PARIWISATA

Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran, Kode Pos : 50519
Telp. (024) 6921424 Faks. (024) 6921463
E-mail : dispartakabsemarang@gmail.com Website :
<https://kabsemarangtourism.id/>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wiwin Sulistyowati, S.T., M.M.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ngesti Nugraha**

Jabatan : **Bupati Semarang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 8 September 2025

Pihak Kedua,

Ngesti Nugraha

Pihak Pertama,

Wiwin Sulistyowati, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710828 200312 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PARIWISATA

Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran, Kode Pos : 50519
 Telp. (024) 6921424 Faks. (024) 6921463
 E-mail : dispartakabsemarang@gmail.com Website : <https://kabsemarangtourism.id/>

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	10,4 persen
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata	Pertumbuhan sektor pariwisata	4,6 persen
3.	Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	17 persen
4.	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
5.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen perangkat daerah	Prosentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.475.581.400	

2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp.	18.388.993.800
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp.	2.788.509.400
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp.	393.397.000

Ungaran, 8 September 2025

Pihak Kedua,
Bupati Semarang

Ngesti Nugraha

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pariwisata

Wiwin Sulistyowati, S.T., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710828 200312 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PARIWISATA

Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran, Kode Pos : 50519
Telp. (024) 6921424 Faks. (024) 6921463
E-mail : dispartakabsemarang@gmail.com Website :
<https://kabsemarangtourism.id/>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wiwini Sulistyowati, S.T., M.M.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ngesti Nugraha**

Jabatan : **Bupati Semarang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Ngesti Nugraha

Pihak Pertama,

Wiwini Sulistyowati, S.T., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710828 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA

Tabel I

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Penetapan	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	3,362	3,362
2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Pembangunan Daerah	Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD	10,3	10,3
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah	Nilai SKM	85,1	85,1

Tabel II

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target Anggaran Penetapan	Target Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	273.318.000	393.397.000
2	Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.374.912.000	9.194.496.900
		Program Pemasaran Pariwisata	1.476.703.900	1.394.254.700

3	Nilai SKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.352.943.100	6.475.581.400
		Jumlah	16.477.877.000	17.457.730.000



PIHAK II
BUPATI SEMARANG

[Handwritten Signature]
Ngesti Nugraha

Ungaran, 1 Oktober 2025



PIHAK I
KEPALA DINAS PARIWISATA

[Handwritten Signature]
Wiwia Sulistyowati, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710828 200312 2 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B2	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket					
				TW I						TW I									B1		B2		B3			T			R				
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R		T	R		T	R			
				(5)						(6)									(7)		(8)		(9)			(10)			(11)		(12)		(13)
10.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kermitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kermitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	23 Dokumen	0	2	0	2	0	2	216.146.000	178.432.000	16.495.000						
11.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	-	966.182.000	15.549.500						
12.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0	0	0	0	0	0	-	109.760.400	70.560.400						
13.				0	0	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Prosentase Pertumbuhan Pelaku Usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	10 persen	2,5	0	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Prosentase Peningkatan Pelaku jasa dan usaha Pariwisata yang dibina	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0	0	0	0	0	0	-	106.728.000	-						
14.				0	0					0	0				3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				0	0	0	0	0	0	-	19.428.000	-						
15.				0	0					0	0				3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				0	0	0	0	0	0	-	39.539.000	-						
16.				0	0					0	0	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Ekonomi Kreatif Tersertifikasi	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	300 Orang	0	0	0	0	0	0	12.320.000	227.702.000	-						
17.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen perangkat daerah	Prosentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	persen	0	0	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah yang disusun	100 %	25	0	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Tata Kelola pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Tata Kelola pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1	1	0	0	0	0	36.210.000	27.773.600	8.171.100						
18.				0	0					0	0				3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara professional	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (LKPJ, LKJP dan LPPD)	3 Laporan	3	0	0	0	0	0	3.222.000	3.159.000	1.376.000						
19.				0	0					0	0				3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara professional	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	2.532.000	2.485.500	-						
20.				0	0					0	0	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara professional	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara professional	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/bulan	41	41	41	41	41	41	4.797.440.000	4.813.716.000	1.139.127.808						
21.				0	0					0	0				3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara professional	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan Keuangan dan LKPD)	6 Dokumen	0	0	0	0	1	1	68.853.500	42.113.500	11.505.500						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B2	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW I						TW I									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
				(1)	(2)					(3)	(4)								(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B1	
22.				0	0				0	0				3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triulanan dan semesteran yang tersusun	3 Laporan	0	0	0	0	1	0	4.083.500	4.049.000	1.584.000		
23.				0	0				0	0				3.26.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	7	0	0	1	0	1	15.215.000	15.215.000	5.059.214		
24.				0	0				0	0				3.26.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	0	0	0	12.508.500	15.080.000	-		
25.				0	0				0	0				3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	-	0	0	0	0	0	0	-	164.910.000	111.110.000		
26.				0	0				0	0				3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 kali	1	1	1	1	1	1	102.690.000	112.486.500	18.913.500		
27.				0	0				0	0				3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 kali	1	1	1	1	1	1	5.790.000	5.300.000	2.670.000		
28.				0	0				0	0				3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1	1	1	1	1	1	2.586.000	2.535.000	510.000		
29.				0	0				0	0				3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Kali	12	0	2	0	2	3	64.937.100	85.410.100	1.320.000		
30.				0	0				0	0				-				0	0	0	0	0	0	-	-	-		
31.				0	0				0	0				3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	2.550.000	1.897.700	600.000		
32.				0	0				0	0				3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	494.579.500	494.631.500	132.418.296		
33.				0	0				0	0				3.26.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	19.988.000	19.935.200	10.515.800		
34.				0	0				0	0				3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum perkantoran	25 Laporan	3	2	2	2	2	2	390.454.000	504.913.800	129.795.047		
35.				0	0				0	0				3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	0	1	5	1	5	1	66.998.000	64.984.000	14.812.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B2	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket				
				TW I						TW I									B1		B2		B3			T	R					
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R					T	R		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B1	(13)	(14)	(15)	B3	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)				
36.				0	0					0	0			3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	1	1	1	1	1	1	79.991.000	79.991.000	78.053.000						
37.				0	0					0	0			3.26.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	0	2	0	2	0	2	14.995.000	14.995.000	3.765.000						
J U M L A H																													17.667.950.000	17.467.730.000	3.091.168.823	

Ungaran, 03/04/2025
Kepala Dinas Pariwisata



Wiwini Susistyowati, S.T., M.M.
NIP. 197108282003122002



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PARIWISATA

Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran, Kode Pos : 50519
Telp. (024) 6921424 Faks. (024) 6921463

E-mail : dispartakabsemarang@gmail.com Website : https://kabsemarangtourism.id/

EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B5	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW II						TW II									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B4	(13)	(14)	(15)	B6	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Pertumbuhan sektor pariwisata	4,6 persen	0	-6,99	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Keberagaman Destinasi Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,17 Hari	0	0	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Keberagaman Destinasi Pariwisata	Persentase DTW yang Dikelola	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata unggulan Kabupaten/Kota	55 Lokasi	0	0	0	0	0	0	24.595.000	24.595.000	17.993.000	
2.		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	17 persen	0	-7,88			Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2,17 Hari	0	0				3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	22 Laporan	0	1	0	1	0	1	39.548.000	39.548.000	3.615.000	
3.				0	0					0	0	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikelola	3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Unit	0	0	0	1	0	1	6.092.044.400	6.092.044.400	2.353.871.626	
4.				0	0					0	0				3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	171 Orang	0	0	0	0	0	0	165.746.000	165.746.000	51.095.000	
5.				0	0					0	0				3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Paket	0	0	0	0	0	0	867.946.000	867.946.000	-	
6.				0	0					0	0				3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18 Laporan	0	0	0	6	0	0	1.873.010.000	1.873.010.000	288.773.000	
7.				0	0					0	0				3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	84.490.500	84.490.500	-	
8.				0	0					0	0				3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	31	0	0	0	4	0	0	47.117.000	47.117.000	28.294.000	
9.				0	0	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatkan Branding Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	14,5	0	0	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Branding Destinasi Pariwisata	Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang Dipromosikan	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah laporan hasil Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6 dok	0	2	0	3	0	3	139.880.300	139.880.300	47.633.895	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B5	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW II						TW II									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R						
				(1)	(2)					(3)	(4)								(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B4	
10.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kermitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kermitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	23 Dokumen	0	0	0	4	0	0	178.432.000	178.432.000	19.219.000	
11.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	0	0	0	0	0	2	966.182.000	966.182.000	208.603.500	
12.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah kegiatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25 Kegiatan	0	2	0	0	0	0	109.760.400	109.760.400	82.560.400	
13.				0	0	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Mengoptimalisa si pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	11,6	0	0	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	110 orang	0	0	0	60	0	0	106.728.000	106.728.000	81.171.000	
14.				0	0					0	0				3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	27 orang	0	0	0	0	0	0	19.428.000	19.428.000	-	
15.				0	0					0	0				3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 Laporan	0	0	0	0	0	0	39.539.000	39.539.000	-	
16.				0	0					0	0				3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	300 Orang	0	0	0	0	100	60	227.702.000	227.702.000	28.821.500	
17.	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi manajemen perangkat daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	25	25	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	25	0	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Tata kelola pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Tata kelola pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0	0	0	0	1	1	27.773.600	27.773.600	11.452.700	
18.				0	0					0	0				3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (LKPJ, LKJP dan LPPD)	3 Laporan	0	0	0	0	0	1	3.159.000	3.159.000	2.075.000	
19.				0	0					0	0				3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	2.485.500	2.485.500	1.992.000	
20.				0	0					0	0				3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	492 Orang/Tahun	41	41	41	44	41	44	4.813.716.000	4.813.716.000	2.325.427.720	
21.				0	0					0	0				3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan Keuangan dan LKPD)	6 Dokumen	0	0	0	0	1	2	42.113.500	42.113.500	19.769.500	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B5	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				T						R									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R		T	R	
				(1)	(2)					(3)	(4)								(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B4	
22.				0	0				0	0				3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triulanan dan semesteran yang tersusun	3 Laporan	0	0	0	0	1	1	4.049.000	4.049.000	2.297.100		
23.				0	0				0	0			3.26.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	0	0	0	0	0	1	15.215.000	15.215.000	6.630.428			
24.				0	0				0	0			3.26.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	0	0	0	15.080.000	15.080.000	-			
25.				0	0				0	0			3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0	0	0	0	0	0	164.910.000	164.910.000	111.110.000			
26.				0	0				0	0			3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 kali	1	1	1	1	1	1	112.486.500	112.486.500	40.509.500			
27.				0	0				0	0			3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 kali	1	1	1	1	1	1	5.300.000	5.300.000	3.120.000			
28.				0	0				0	0			3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1	1	1	1	1	1	2.535.000	2.535.000	1.020.000			
29.				0	0				0	0			3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Kali	4	3	4	3	4	4	85.410.100	85.410.100	19.365.060			
30.				0	0				0	0								0	0	0	0	0	0	-	-	-		
31.				0	0				0	0				3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1.897.700	1.897.700	1.438.000		
32.				0	0				0	0				3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	494.631.500	494.631.500	241.205.283		
33.				0	0				0	0				3.26.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	19.935.200	19.935.200	13.567.000		
34.				0	0				0	0				3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum perkantoran	25 Laporan	2	2	2	2	2	3	504.913.800	504.913.800	228.479.594		
35.				0	0				0	0				3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	5	1	5	1	5	1	64.984.000	64.984.000	31.332.677		



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PARIWISATA

Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran, Kode Pos : 50519
 Telp. (024) 6921424 Faks. (024) 6921463

E-mail : dispartakabsemarang@gmail.com Website : https://kabsemarangtourism.id/

**EVALUASI RENCANA AKSI
 TRIWULAN III TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B8	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW III						TW III									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Pertumbuhan sektor pariwisata	4,6 persen	0	-31,87	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Keberagaman Destinasi Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,17 Hari	0	0	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Keberagaman Destinasi Pariwisata	Persentase DTW yang Dikelola	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata unggulan Kabupaten/Kota	55 Lokasi	0	0	0	0	0	0	24.595.000	24.595.000	21.586.000	
2.		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	17 persen	0	-71,69		Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2,17 Hari	0	0	3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	22 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	39.548.000	39.548.000	3.615.000			
3.			0	0								3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikelola	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Unit	0	0	0	1	0	1	6.092.044.400	6.092.044.400	3.737.907.461	
4.			0	0											3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	171 Orang	0	0	0	100	0	0	165.746.000	165.746.000	128.221.000	
5.			0	0											3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Paket	0	0	0	0	0	0	867.946.000	867.946.000	4.823.000	
6.			0	0											3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18 Laporan	0	0	0	0	0	4	1.873.010.000	1.873.010.000	781.677.000	
7.			0	0											3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	84.490.500	84.490.500	54.849.340	
8.			0	0											3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	31	0	0	0	0	0	4	47.117.000	47.117.000	45.317.000	
9.			0	0			3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatkan Branding Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	14,5	0	0	3.26.03.2.01.0003 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Branding Destinasi Pariwisata	Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang Dipromosikan	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah laporan hasil Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6 dok	0	0	0	3	0	0	139.880.300	139.880.300	98.349.895

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B8	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket									
				TW III						TW III									B1		B2		B3			T			R								
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R		T	R		T	R							
				(5)						(6)									(7)		(8)		(9)			(10)			(11)		B7		(13)		(14)		(15)
10.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	23 Dokumen	0	2	0	3	0	2	178.432.000	178.432.000	115.704.500										
11.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	0	0	0	5	0	0	966.182.000	966.182.000	831.619.950										
12.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah kegiatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25 Kegiatan	0	5	0	5	0	5	109.760.400	109.760.400	93.060.400										
13.				0	0	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	11,6	0	0	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	110 orang	0	0	0	0	0	50	106.728.000	106.728.000	103.258.000										
14.				0	0					0	0				3.26.05.2.01.0010 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	27 orang	0	27	0	0	0	0	19.428.000	19.428.000	19.378.000										
15.				0	0					0	0				3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 Laporan	0	0	0	0	0	2	39.539.000	39.539.000	36.599.000										
16.				0	0					0	0				3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	300 Orang	0	30	0	30	100	30	227.702.000	227.702.000	47.329.000										
17.	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi manajemen perangkat daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	25	25	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	25	0	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Tata kelola pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Tata kelola pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0	0	0	0	1	1	27.773.600	27.773.600	17.370.600										
18.				0	0					0	0				3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (LKPJ, LKJP dan LPPD)	3 Laporan	0	0	0	0	0	1	3.159.000	3.159.000	2.739.000										
19.				0	0					0	0				3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	2.485.500	2.485.500	2.485.500										
20.				0	0					0	0				3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	492 Orang/Tahun	41	44	41	44	41	44	4.813.716.000	4.813.716.000	3.224.335.753										
21.				0	0					0	0				3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan Keuangan dan LKPD)	6 Dokumen	0	0	0	0	1	1	42.113.500	42.113.500	31.624.500										

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B8	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket					
				TW III						TW III									B1		B2		B3			T	R						
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R		T	R						
				(5)						(6)									(7)		(8)		(9)			(10)			(11)		(12)		(13)
22.				0	0					0	0				3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triulanan dan semesteran yang tersusun	3 Laporan	0	0	0	0	1	1	4.049.000	4.049.000	3.278.100						
23.				0	0					0	0	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	0	0	0	0	0	2	15.215.000	15.215.000	11.360.346						
24.				0	0					0	0	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.26.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	0	0	0	15.080.000	15.080.000	-						
25.				0	0					0	0	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah pelaksanaan Peralatan dan administrasi umum Perangkat Daerah	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0	0	0	0	0	0	164.910.000	164.910.000	111.110.000						
26.				0	0					0	0				3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 kali	1	1	1	1	1	1	112.486.500	112.486.500	75.257.500						
27.				0	0					0	0				3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 kali	1	1	1	1	1	1	5.300.000	5.300.000	4.906.000						
28.				0	0					0	0				3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1	1	1	1	1	1	2.535.000	2.535.000	1.590.000						
29.				0	0					0	0				3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Kali	4	3	4	2	4	2	85.410.100	85.410.100	55.658.160						
30.				0	0					0	0																						
31.				0	0					0	0				3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1.897.700	1.897.700	1.438.000					
32.				0	0					0	0				3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	494.631.500	494.631.500	351.624.999						
33.				0	0					0	0				3.26.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	19.935.200	19.935.200	16.552.600						
34.				0	0					0	0				3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum perkantoran	25 Laporan	2	2	2	2	2	2	504.913.800	504.913.800	328.953.182						
35.				0	0					0	0				3.26.01.2.09.0002 - Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	5	12	5	2	5	2	64.984.000	64.984.000	41.263.177						



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PARIWISATA

Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran, Kode Pos : 50519
 Telp. (024) 6921424 Faks. (024) 6921463

E-mail : dispartakabsemarang@gmail.com Website : <https://kabsemarangtourism.id/>

**EVALUASI RENCANA AKSI
 TRIWULAN IV TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B11	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket
				TW IV						TW IV									B1		B2		B3			T	R	
				T	R					T	R								T	R	T	R	T	R				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B10	(13)	(14)	(15)	B12	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Pertumbuhan sektor pariwisata	4,6 persen	4,6	0	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Keberagaman Destinasi Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,17 Hari	0	0	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Keberagaman Destinasi Pariwisata	Persentase DTW yang Dikelola	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata unggulan Kabupaten/Kota	55 Lokasi	0	0	0	0	55	0	24.595.000	24.595.000	24.072.500	
2.		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	17 persen	17	0			Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2,17 Hari	0	0				3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	22 Laporan	0	1	0	1	22	0	39.548.000	39.548.000	39.548.000	
3.				0	0					0	0	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikelola	3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Unit	0	0	0	1	0	0	6.092.044.400	6.092.044.400	5.190.982.649	
4.				0	0					0	0				3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	171 Orang	0	0	0	0	171	0	165.746.000	165.746.000	165.446.000	
5.				0	0					0	0	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Paket	0	0	0	1	1	0	867.946.000	867.946.000	806.505.381	
6.				0	0					0	0				3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18 Laporan	0	0	0	2	18	0	1.873.010.000	1.873.010.000	1.871.806.000	
7.				0	0					0	0				3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota	1 dokumen	0	0	0	0	1	0	84.490.500	84.490.500	83.685.834	
8.				0	0					0	0				3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas layanan dan keberagaman destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	31	0	0	0	2	31	0	47.117.000	47.117.000	47.117.000	
9.				0	0	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatkan Branding Destinasi Pariwisata	Prosentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	14,5	14,5	0	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Branding Destinasi Pariwisata	Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang Dipromosikan	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah laporan hasil Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6 dok	0	0	0	0	6	0	139.880.300	139.880.300	138.862.895	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B11	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket		
				TW IV						TW IV									T	R	T	R	T	R		T	R		T	R
				T	R					T	R																			
				T	R					T	R																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	B10	(13)	(14)	(15)	B12	(17)	(18)						(19)	(20)		(21)		
10.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kermitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kermitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	23 Dokumen	0	2	0	2	23	0	178.432.000	178.432.000	178.356.500			
11.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	0	1	0	0	9	0	966.182.000	966.182.000	962.996.950			
12.				0	0					0	0				3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan branding destinasi pariwisata	Jumlah kegiatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25 Kegiatan	0	2	0	2	25	0	109.760.400	109.760.400	109.760.400			
13.				0	0	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Mengoptimalisa si pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	11,6	11,6	0	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	110 orang	0	0	0	0	110	0	106.728.000	106.728.000	106.628.000			
14.				0	0					0	0				3.26.05.2.01.0010 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	27 orang	0	0	0	0	27	0	19.428.000	19.428.000	19.378.000			
15.				0	0					0	0				3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 Laporan	0	0	0	1	3	0	39.539.000	39.539.000	39.539.000			
16.				0	0					0	0				3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pelaku jasa sarana pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	300 Orang	0	150	0	0	100	0	227.702.000	227.702.000	227.248.000			
17.	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi manajemen perangkat daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	25	20	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	25	0	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Tata kelola pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Tata kelola pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0	0	1	1	1	0	27.773.600	27.773.600	27.467.600			
18.				0	0					0	0				3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (LKPJ, LKJP dan LPPD)	3 Laporan	0	0	0	0	0	0	3.159.000	3.159.000	3.159.000			
19.				0	0					0	0				3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1	1	1	1	1	0	2.485.500	2.485.500	2.485.500			
20.				0	0					0	0				3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	492 Orang/Tahun	41	44	41	44	41	0	4.813.716.000	4.813.716.000	4.101.680.001			
21.				0	0					0	0				3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan Keuangan dan LKPD)	6 Dokumen	0	1	0	1	3	0	42.113.500	42.113.500	42.113.500			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	B11	PENTAHAPAN						PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		Ket						
				TW IV						TW IV									B1	B2		B3		T		R								
				T	R					T	R									T	R													
				(1)	(2)					(3)	(4)								(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)			(11)	B10	(13)	(14)	(15)	B12
22.				0	0					0	0				3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triulanan dan semesteran yang tersusun	3 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.049.000	4.049.000	4.049.000			
23.				0	0					0	0	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.26.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.215.000	15.215.000	12.871.528			
24.				0	0					0	0	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.26.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	15.080.000	15.080.000	15.068.000			
25.				0	0					0	0	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah pelaksanaan Peralatan dan administrasi umum Perangkat Daerah	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0	2	0	2	5	0	0	0	0	0	164.910.000	164.910.000	160.404.000			
26.				0	0					0	0				3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 kali	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	112.486.500	112.486.500	99.263.000			
27.				0	0					0	0				3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 kali	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000	5.296.000			
28.				0	0					0	0				3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2.535.000	2.535.000	2.520.000			
29.				0	0					0	0				3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Kali	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	85.410.100	85.410.100	80.948.160			
30.				0	0					0	0				3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
31.				0	0					0	0				3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1.897.700	1.897.700	1.719.700	
32.				0	0					0	0				3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	494.631.500	494.631.500	446.892.261			
33.				0	0					0	0				3.26.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	19.935.200	19.935.200	19.498.200			
34.				0	0					0	0				3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum perkantoran	25 Laporan	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	504.913.800	504.913.800	465.109.516			
35.				0	0					0	0				3.26.01.2.09.0002 - Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan secara profesional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	5	2	5	2	5	0	0	0	0	0	64.984.000	64.984.000	64.794.423			

**RENCANA KI NERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi		
						Target Kinerja	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	10,4 persen								
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata	Pertumbuhan sektor pariwisata	4.60 persen	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1 Hari	9.194.496.900	Dinas Pariwisata			
2			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan		17.00 persen	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara				2 Hari	
3				3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang Dikelola	100 %	64.143.000				
4				3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikelola	100 %	6.257.790.400				
5				3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	100 %	2.872.563.500				
6				3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Peningkatan Kunjungan wisatawan		15	1.394.254.700	Dinas Pariwisata		
7						Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.396.900				
8				3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang Dipromosikan	60 %	1.394.254.700				
9				3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100.00 persen	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	12	393.397.000	Dinas Pariwisata	
10							3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi	12 %	165.695.000	
11			3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				Persentase SDM Ekonomi Kreatif Tersertifikasi	%	227.702.000		
	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100 persen								
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen perangkat daerah	Prosentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100.00 persen	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	6.475.581.400	Dinas Pariwisata			
13						3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun			9 dokumen	33.418.100
14						3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun			12 laporan	4.859.878.500
15						3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			11 jenis	15.215.000
16						3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			1 jenis	15.080.000
17						3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			12 kali	370.641.600



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PARIWISATA

Alamat : Jl. Diponegoro No.202, Mijen, Gedanganak, Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang,
Jawa Tengah , No.Tlp: 0246921424,

Website : <https://kabsemarangtourism.com> E-mail : dispartakabsemarang@gmail.com , 50519

Ungaran, 25 April 2025

Nomor : 00.8.6.3/ *00329* /2025
Lampiran : -
Perihal : Tindaklanjut hasil Rekomendasi LHE SAKIP 2025

Kepada : Yth. Inspektur Kabupaten Semarang
di Tempat

Menindaklanjuti surat Plt. Inspektur Kabupaten Semarang Nomor 700.1.2.1/0468.34/2025 Tanggal 21 Maret 2025 tentang Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Tahun 2024, berikut bahwa dalam upaya tindaklanjut terhadap rekomendasi perbaikan Dokumen AKIP, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang menyampaikan :

1. Telah secara rutin melaksanakan rapat internal POK sebagai upaya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala dalam upaya mengoptimalkan capaian kinerja
2. Telah melakukan inventarisasi capaian terhadap rencana Aksi yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian kinerja Organisasi Dinas Pariwisata dalam kurun waktu satu tahun
3. Telah menerapkan SOP pengeumpulan data kinerja sebagai bentuk standarisasi kualitas penyusunan laporan kinerja
4. Telah melakukan penyesuaian penulisan laporan sesuai dengan sistematika dan format baku penyusunan LKJIP.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PARIWISATA

WINI SULISTYOWATI, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197108282003122002



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letjen Suprpto No. 7A, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50514,
Telepon (024) 6921419, Faxsimile (024) 6921419,
Laman www.itkab.semarangkab.go.id, Pos-el inspektoratkabsemarang@gmail.com

**BERITA ACARA
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **29 April** tahun **2025**, bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang, kami :

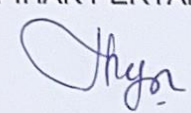
1. Nama : Toetoet Triharyanti, S.H.
NIP : 19670819 198809 2 001
Jabatan : Plt.Inspektur Pembantu IV
Disebut sebagai Pihak Pertama
2. Nama : Didik Setiawan, S.H.M.M.
NIP : 19730718 199803 1 005
Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.
Disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua belah pihak telah menyepakati pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dengan jumlah rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut, sudah ditindaklanjuti sebanyak 5 sebagaimana rincian terlampir.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Didik Setiawan, S.H.M.M.
NIP. 19730718 199803 1 005

PIHAK PERTAMA

Toetoet Triharyanti, S.H.
NIP. 19670819 198809 2 001

MENGETAHUI
Plt.INSPEKTUR KABUPATEN SEMARANG


Suwarno, S.E.
NIP. 19831123 200904 1 001

Lampiran : Tindaklanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

Tindaklanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Rekomendasi	Tindak lanjut	Status/ Progress Penyelesaian	Link Data Dukung	Ke t
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Kinerja	Sumber LHE AKIP Internal PD	1. Dokumen DPA 2024 2. Dokumen DPPA 2024 3. Renstra 2021- 2026 4. Renja Perubahan 2024 5. Laporan Rencan Aksi 2024	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1h9IEbTECDaBM_fKBivZn0I3cK4qDa2q1?usp=sharing	
2	Pengukuran Kinerja	Sumber LHE AKIP Internal PD	1. Cascading indicator kinerja Dinas Pariwisata 2. SK Tim SAKIP Dinas Pariwisata 3. SOP Pengum[ulan Data Kinerja Dinas Pariwisata	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1b7_PU0jnqIZayVkokpxbQewayaIEolNQ?usp=sharing	
3	Pelaporan Kinerja	Sumber LHE AKIP Internal PD	1. Dokumen LKJIP setelah review 2. Bukti aiploas dokumen LKJIP pada website Dinas Pariwisata (APIkS)	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1CDH8ZRQgbqgN94D_Lwl87yAa1tHGfFpD?usp=sharing	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Sumber LHE AKIP Internal PD	Dokumen hasil tindaklanjut rekomendasi LHE 2025 Inspektorat Kab semarang	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1GmITqQMEw94PGSj3vHVmEyCkKUKeUWpL?usp=sharing	



Ungaran, April 2025
Plt.INSPEKTUR KAB SEMARANG

SUWARNO, S.E.
Pembina
NIP. 19831123 200904 1 001

**PROSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN 2018-2025
KABUPATEN SEMARANG**

REALISASI	Satuan	Tahun								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wisatawan Nusantara	Orang	2,666,164	2,955,942	3,502,729	1,577,216	1,451,670	3,848,816	3,531,786	4,328,318	4,506,002
<i>Persentase peningkatan = (n - (n-1)) / (n-1) x 100%</i>	%		10.87	18.50	(54.97)	(7.96)	165.13	(8.24)	22.55	4.11
Wisatawan Mancanegara	Orang	9,737	8,592	7,560	609	217	1,123	2,344	2,333	5,943
<i>Persentase peningkatan = (n - (n-1)) / (n-1) x 100%</i>	%		(11.76)	(12.01)	(91.94)	(64.37)	417.51	108.73	(0.47)	155
Wisatawan	Orang	2,675,901	2,964,534	3,510,289	1,577,825	1,451,887	3,849,939	3,534,130	4,330,651	4,511,945
<i>Persentase peningkatan = (n - (n-1)) / (n-1) x 100%</i>	%		10.79	18.41	(55.05)	(7.98)	165.17	(8.20)	22.54	4.19

**KONTRIBUSI DAN PROSENTASE PENINGKATAN PAD SEKTOR PARIWISATA
REALISASI PENDAPATAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN DAN RESTRIBUSI JASA USAHA PARIWISATA**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PAJAK HOTEL	4,569,249,789	4,588,476,643	8,486,163,434	9,976,419,655	11,296,400,048	10,026,708,859
PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN	8,652,296,632	11,257,369,069	17,629,046,100	22,884,436,715	25,479,045,418	26,385,305,500
PAJAK HIBURAN	5,474,956,136	2,936,001,351	9,909,577,361	9,691,128,473	15,625,388,418	9,476,707,767
RETRIBUSI DINAS PARIWISATA	5,574,727,000	3,108,416,000	11,797,330,500	10,636,650,000	9,997,283,000	9,010,987,300
PAD Sektor Pariwisata	24,271,229,557	21,890,263,063	47,822,117,395	53,188,634,843	62,398,116,884	54,899,709,426
PAD KAB. SEMARANG	442,528,167,478	575,748,368,835	480,302,999,649	530,154,806,743	597,793,416,296	740,760,386,215
Kontribusi pariwisata terhadap PAD						
Rumus: = (PAD sekPar / PAD Kab. Semarang) x 100%	5.48	3.80	9.96	10.03	10.44	7.41
Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata						
Rumus; = (PAD sekPar - PAD SekPar (n-1)) / PAD SekPar (n-1) x 100%		(9.81)	118.46	11.22	17.31	(12.02)